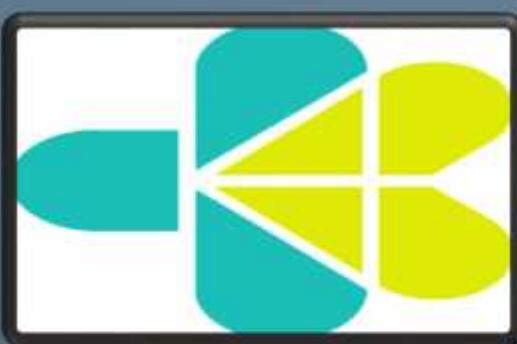


PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2018**



DINAS KESEHATAN PAPUA BARAT

www.dinkespapuabarat.org



MANOKWARI, FEBRUARI 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita, sehingga dapat tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2018.

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Masyarakat) serta sebagai sarana evaluasi kedalam atas pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Pelaksanaan Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun ke - 2 dari Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2017 – 2022, namun demikian kami menyadari masih dijumpai tantangan dan masalah sehingga masih ada sasaran yang belum tercapai, tetapi optimis yang tinggi senantiasa tetap dimiliki untuk lebih meningkatkan kinerja pada Tahun – tahun mendatang.

Kami berharap Laporan ini dapat dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan Kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan khususnya di Bidang Kesehatan Papua Barat.

Manokwari, 7 Februari 2018



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan	2
D. Analisa Aspek Strategis	4
E. Sitematika Penulisan	
BAB II PERENCANAAN	
A. Rencana Strategis	8
1. Visi dan Misi	8
2. Tujuan dan sasaran	8
B. Perjanjian Kinerja dan Indikator Utama	10
1. Perjanjian Kinerja	10
2. Indikator Kinerja Utama.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Pengukuran Kinerja	19
B. Capaian Sasaran Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018	19
C. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2018	25
D. Analisis Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2018.....	27
E. Analisis Realisasi Kiberja Utama Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2018 denga Tahun sebelumnya	29
F. Realisasi Anggaran	33
G. Prestasi Tahun 2018	41
BAB IV PENUTUP	43

LAMPIRAN-LAMPIRAN : 45

- I. Matrix rencana strategis Dinas Kesehatan Papua Barat 2017 -2022
- II. Perjanjian kinerja Tahun 2018
- III. Rincian Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Kesehatan Tahun 2018.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2018 menggambarkan pencapaian kinerja selama tahun 2018. Pencapaian kinerja berupa pelaksanaan kegiatan ini di susun dan dilaksanakan berdasarkan rencana kinerja tahun 2018 yang mengacu pada rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dalam tahun 2018 melaksanakan 14 (Empat Belas) Program dengan 67 (Enam Puluh Tujuh) Kegiatan untuk memenuhi 6 (Enam) sasaran strategis sesuai rencana kinerja tahun 2018. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebesar Rp. 105.932.028.000,04 (Seratus lima miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Puluh Delapan Ribu Koma Nol Empat Rupiah) jumlah tersebut telah terealisasikan sebesar Rp.92.121.112.306,00 (Sembilan puluh dua milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Tiga ratus Enam Rupiah) atau 87% dari anggaran yang tersedia.

Tidak tercapainya penyerapan anggaran 100% oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat antara lain disebabkan keterbatasan kuantitas aparatur Sipil Negara (ASN) pada OPD Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan berbagai program kegiatan dengan mekanisme pencairan dana yang menganut satu pintu namun belum memiliki SOP.

Dari 6 (Enam) sasaran yang ada dan tingkat pencapaiannya adalah sebagaimana dibawah ini:

1. Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelola APBD (90 %)

2. Meningkatnya ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang Aparatur (80 %)
3. Meningkatkan disiplin dan Kapasitas sumber daya aparatur (60 %)
4. Meningkatnya Sistem pelaporan (90 %)
5. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Mayarakat (90 %)
6. Meningkatkan Akses dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas dan merata (80 %)

Belum Optimalnya pencapaian sasaran tersebut diatas terutama disebabkan oleh tingkat pemahaman SDM Dinas Kesehatan Papua Barat terkait dengan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Undang – undang no 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraaan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah saty azaz umum dalam penyelenggaraan Negara. Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi. Azaz akuntabilitas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja kementerian, lembaga, pemerintahan diberbagai tingkatan dan institusi yang menggunakan serta mengelola sumber daya negara, yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Penyusunan Laporan kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat berpedoman pada peraturan Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instasnsi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Papua Barat merupakan tolak ukur keberhasilan dalam Pelaksanaan Program, Kebijakan dan pengembangan Kesehatan Masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak –pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu Lembaga.

B. Landasan Hukum

1. Undang – undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – undang no 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
4. Undang –undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
5. Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Meneteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan.

Pembentukan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat, yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Papua Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat merupakan lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Struktur Dinas Kesehatan Papua Barat berdasarkan Peraturan Gubernur no 20 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Papua Barat, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, Terdiri dari :
 - 1) Subbagian Program Informasi Dan Humas;
 - 2) Subbagian Keuangan & Pengelolaan Asset
 - 3) Subbagian Hukum, Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Keluarga & Gizi
 - 2) Seksi Promosi & Pemberdayaan Masyarakat
 - 3) Seksi Kes Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
- d. Bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit (P2P), terdiri dari :
 - 1) Seksi Surveilans & Imunisasi
 - 2) Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular
 - 3) Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Kesehatan Jiwa
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 3) Seksi pelayanan Kesehatan Tradisional.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kefarmasian
 - 2) Seksi Alat Kesehatan dan PKRT
 - 3) Seksi SDK

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis umum pemerintah daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mempunyai fungsi :

- 1) Membantu pengelolaan pembangunan kesehatan yang lebih baik dan keberlanjutan;

- 2) Menghasilkan rencana dan pembangunan kesehatan yang terarah kepada memenuhi hak masyarakat;
- 3) Memecahkan isu-isu strategis kesehatan, mendorong terwujudnya komitmen, kesepakatan dan kerja sama antara instansi masing-masing dan dengan masyarakat;
- 4) Mengkomunikasikan dan memasarkan eksistensi kesehatan (peningkatkan kesadaran);
- 5) Penyediaan pelayanan kesehatan lebih baik berdasarkan data yang akurat dan upaya untuk meningkatkan kapasitas penyampaian pelayanan;
- 6) Pengelolaan keuangan lebih baik, terbuka dan akuntabel

D. Analisis Aspek Strategis

Aspek Strategis adalah Aspek yang mendukung dan Merupakan sumberdaya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi Dinas Kesehatan Paua Barat, Aspek – aspek tersebut antara lain .

1. Aspek sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2018 sebanyak 163 Orang, lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2017 (Sebanyak 150 Orang), sebagian merupakan tenaga Fungsional kesehatan (sebanyak 62 Orang) yang terdistribusi di RSUD Kab. Manokwari dan Puskesmas – Puskesmas sekitar di Kabupaten Manokwari, sebagaimana dapat dilihat dari Tabel berikut :

TABEL D. 1

Posisi Pegawai Per 31 Desember 2018, menurut Golongan dan Jabatan

Uraian	Per 31/12/2017	Mutasi		Per 31/12/2018
		Tambah	Kurang	
a. Struktural				
▪ Eselon II	1	-	-	1
▪ Eselon III	5	-	-	5
▪ Eselon IV	15	-	-	15
Sub jumlah	21	-	-	21
b. Fungsional				
	73	-	11	62
c. Staf	56	24	-	80
Jumlah	150	-	-	163

2. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Papua Barat memiliki sarana/ Prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Operasional Dinas Kesehatan, sarana dan prasarana tersebut berupa Gedung, Gudang, Mobil (Mobil Dinas, Ambulans dan Puskesmas Keliling). Kegiatan Operasional Dinas kesehatan Papua Barat dilakukannya di :

- 1) Kantor Utama/ Gedung Induk terletak di Komplex Perkantoran Gubernur Papua Barat Jalan Brigjen (Purn) Abraham Ataruri, Arfai, Manokwari.
- 2) Gudang Farmasi (Dibawah Seksi Kefarmasian) terletak di Jalan Brigjen (Purn) Abraham Ataruri, Arfai, Manokwari.

Sarana Penunjang Kegiatan Pelayanan yang dimiliki Oleh Dinas Kesehatan Papua Barat antara lain :

- 1) 2 Buah Ambulance;
- 2) 21 Unit Mobil Dinas/ Operasional
- 3) 38 Unit Motor/ Kendaraan Operasional
- 4) 67 Unit Laptop
- 5) 14 Unit Personal Computer/ PC

3. Aspek Pembiayaan Kesehatan.

Berdasarkan penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat memperoleh alokasi dana sebesar Rp.105.932.028.000,04 (Seratus Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh dua Juta Dua Puluh Delapan Ribu Koma Nol Empat Rupiah) atau menurun sebesar 49 % dari Anggaran Tahun 2017 yang sebesar Rp. 198.300.932.132,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Juta Sembilan ratus Tiga Puluh Dua Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

Dengan dukungan Anggaran sebesar Rp. 105.932.028.000,04 (Seratus Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh dua Juta Dua Puluh Delapan Ribu Koma Nol Empat Rupiah) diharapkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat akan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan dan kegiatan lainnya sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan memerlukan koordinasi antara bidang/bagian yang memadai sehingga pencapaian sasaran program atau kegiatan yang bersangkutan dapat lebih efektif.

4. Aspek Permasalahan Kesehatan

Prioritas Masalah Kesehatan di Provinsi Papua Barat pada Tahun 2018 di Prioritaskan pada 6 (Enam) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- 1) Jumlah Kematian Ibu OAP
- 2) Jumlah Kematian Anak OAP
- 3) Pravelansi HIV/ AIDS
- 4) Rasio Tenaga Kesehatan, Dokter, Tenaga Medis Persatuan Penduduk
- 5) Cakupan Jumlah Puskesmas Terakreditasi di Distrik
- 6) Jumlah RSUD Rujukan Provinsi

E. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dengan susunan sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

- a) Latar Belakang
- b) Landasan Hukum
- c) Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan
- d) Analisis Aspek Strategis

e) Sistematika Laporan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

B. Capaian Sasaran Kinerja Kinerja

C. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

D. Analisis Target dan Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2018

E. Analisis Realisasi Indivcator Kinerja Utama Tahun 2018 dengan
Tahun sebelumnya

F. Realisasi Anggaran

G. Prestasi Tahun 2018

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN –LAMPIRAN

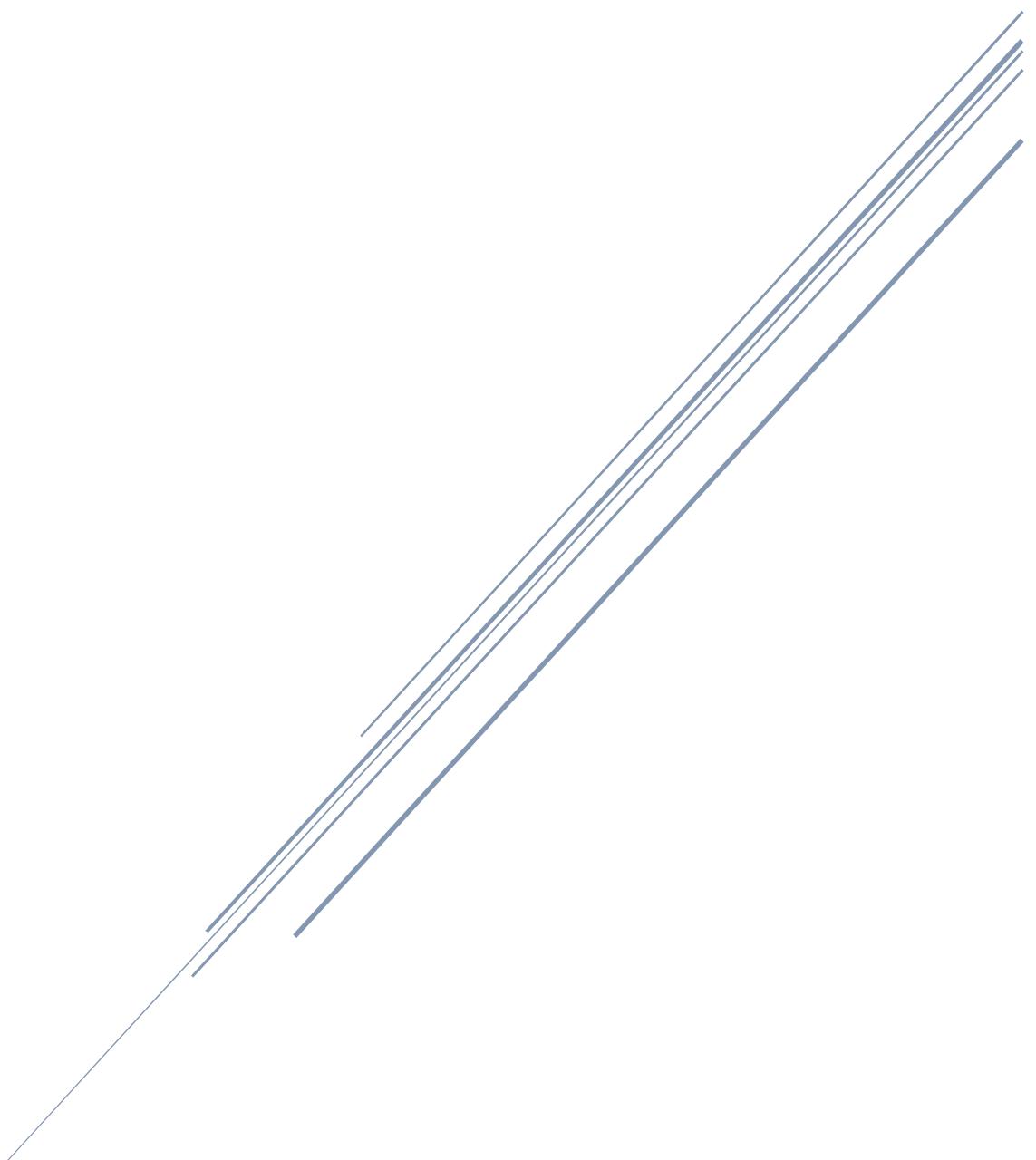
A. Matrix rencana strategis Dinas Kesehatan Papua Barat 2017 -2022

B. Perjanjian kinerja Tahun 2018

C. Rincian Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Kesehatan Tahun
2018.

BAB II PERENCANAAN

LAKIP 2018



BAB II PERENCANAAN

Sebagai sebuah institusi pelayanan publik mempunyai rencana strategis yang berorientasi selama kurun waktu lima tahun 2017-2022 dengan peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Sesuai dengan ketentuan inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas Instansi pemerintah (AKIP), Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat telah membuat Rencana Strategis (RENSTRA) periode tahun 2017-2022 sebagai dokumen perencanaan taktis strategis untuk menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana strategis adalah suatu alat manajemen, yang merupakan proses berkelanjutan dan sistimatis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan manfaat sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipasi dan mengorganisasikan secara sistematiknya untuk usaha-usahanya melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik. Rencana strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan pengembangan lingkungan strategis baik lokal maupun nasional.

Analisis terhadap lingkup organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam perhitungan kekuatan (strength), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan / kendala (threats) yang ada.

Dengan Visi, Misi dan Strategis yang jelas dan tepat maka diharapkan Instansi Pemerintah akan menyelaraskan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. rencana strategis bersama pengukuran, penilaian dan Evaluasi kinerja serta pelaporan Akuntabilitas Kinerja merupakan tolak ukur paling penting dari suatu system Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Dari uraian singkat diatas, unsur – unsur utama yang perlu secara formal di definisikan dalam

suatu rencana Strategis adalah pernyataan Visi dan Misi, Penjabaran Tujuan dan Sasaran Strategis serta perumusan Strategis pencapaian tujuan atau sasaran berupa Program dan Kegiatan.

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi dari Provinsi Papua Barat adalah “ MENUJU PAPUA BARAT YANG AMAN, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT”

Visi tersebut di atas merupakan suatu kondisi penyelengaraan pemerintah daerah

secara umum yang hendaknya diwujudkan melalui peranan Dinas Kesehatan sebagai institusi yang mempunyai tugas pengawasan umum pemerintah daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Sedangkan Misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat adalah “ Meningkatkan kualitas Pelayanan dasar di bidang Pendidikan dan Kesehatan

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ditetapkan dalam rangka untuk mewujudkan misi tersebut adalah terwujudnya sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan APBD
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang aparatur.
3. Pelaporan Kinerja dan Keuangan OPD tepat waktu

4. Meningkatnya capaian pelaksanaan Program pendudukung sasaran Dinas Kesehatan.

5. Terjangkaunya Pelayanan Kesehatan oleh seluruh masyarakat.

B. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama.

1. Perjanjian Kinerja

Untuk mengukur capaian setiap sasaran Strategis maka telah ditetapkan 6 (Enam) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada RENSTRA Dinas Kesehatan 2017-2022. Rumusan tersebut tertuang didalam perjanjian kinerja (PK) Tahun 2018. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018, berdsarkan Dokumen Perancanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018 Dinas Kesehatan Papua Barat mendapatkan Anggaran Belanja sebesar Rp.105.932.028.000,04 (Seratus Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh dua Juta Dua Puluh Delapan Ribu Koma Nol Empat Rupiah) dengan 14 Program dan 67 Kegiatan (terlampir)

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2018 dan melaporkannya dalam laporan Kinerja. Perjanjian Kinerja meu[akan perwujudan dan bentuk Komitmen yang dituangkan dalam rencana kinerja Tahunan yang merupakan penggalan dari suatu perencanaan strategis dalam waktu satu Tahun. Untuk mengetahui indicator kinerja dan rencana tingkat capaian (Target) dapat dilihat pada Tabel berikut ini .

Tabel II . 1 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2018

SASARAN I MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFektifitas PENGELOLAAN APBD			
No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian Kinerja
1	(2)	(3)	(4)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	Tersediaanya Jasa Surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	100%
	Tersediaanya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi , sumber daya air dan Listrik	12 Bulan
	Tersediannya Jasa Adminitrasi Keuangan	Terpenuhinya pertanggungjawaban dan laporan keuangan yang lengkap	12 bulan
	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	terpeliharannya kebersihan kantor	1 Unit
	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	48 Jenis
	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhanbarang cetakan dan Penggandaan	6 Jenis
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi	5 Komponen
	Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2509 Jenis
	Tersediannya Makanan dan Minuman untuk kegiatan penunjang lainnya	Terpenuhinya makanan da minuman untuk kegiatan penunjang lainnya	30 Orang
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	terpenuhinya kebutuhan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun	
	Tersediaanya database SDM Kesehatan	Dokumen hasil pemutahiran Data Pegawai	13 Kab/ Kota

SASARAN II Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur			
No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian Kinerja
1	(2)	(3)	(4)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional tersedia	6 Unit
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peralatan kantor	1 Jenis
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Perlengkapan Kantor	10 Jenis
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional terpelihara	82 Unit
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan kantor terpelihara	3 Jenis
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (perlengkapan kantor) terpenuhi	100%
	Pengadaan Pendaratan Medical Boat	Tersedianya Pendaratan Untuk Medical Boat	1 Unit
	Pengukuran Lahan dan Pembuatan Sertifikat Lahan	Tersedianya Sertifikat Lahan	1 Lahan
	Pengadaan Pintu Harmonika Gedung Reaksi Cepat	Pintu Harmonika Gedung Reaksi Cepat Tersedia	3 Pintu

SASARAN III Meningkatkan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian Kinerja
1	(2)	(3)	(4)
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	528 Stell
4	Tersedianya Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	Terpenuhinya Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	283 Stell
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
	Terlaksannya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Kegiatan	312 Orang
	Terlaksananya Bimtek Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta Kegiatan	6 Orang
	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah di bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen yang tersusun	1 Dokumen

SASARAN IV Meningkatkan Kualitas Sistem Pelaporan

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian Kinerja
1	(2)	(3)	(4)
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		
	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Laporan Kualitas Rencana Kerja Dinas Kesehatan	1 Laporan
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Per Triwulan	4 Dokumen
	Penyusunan dan Sosialisasi SKP ASN	Tersusunnya Profesionalisme Aparatur (Presensi dan Pelaksanaan SKP)	1 Dokumen
	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)	Tersedianya Renja,RKA Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	1 Dokumen
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Nilai LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	1 Dokumen
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Kesenjangan anggaran kas dan realisasi Anggaran dinas Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	1 Dokumen
	Rapat Koordinasi Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	Dokumen Perencanaan DAK Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota dan RSUD	1 Kegiatan
	Rapat Kerja Kesehatan Daerah	Terlaksananya Raker Bidang Kesehatan se-Provinsi Papua Barat	1 Kegiatan
	Hari Kesehatan Nasional	Hari Kesehatan Nasional	1 Kegiatan

SASARAN V Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat			
No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian Kinerja
1	(2)	(3)	(4)
6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		
	Pengadaan Buffer Stok Obat dan Bahan Pakai Habis	Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 100%	100%
	Distribusi Obat, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin	Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 100%	13 Kab/ Kota
	DAK Farmasi	ketersediaan Operasional Farmasi 100 %	1 Dokumen
	Pembangunan / Penataan Halaman Instalasi Farmasi	Terwujudnya Halaman IFP yang tertata dan bersih	1 Lahan
7	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Lanjutan)	Tersedianya Buffer Stock Obat Provinsi	1 Penyedia
	Penyediaan Program Aplikasi Perkantoran	Tersedianya Aplikasi Inventory Barang	1 Aplikasi
Program Upaya Kesehatan Masyarakat			
7	Rapat Koordinasi Teknis dan Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi	Terkumpulnya Data Profil Kesehatan Provinsi	1 Dokumen
	Rapat Koordinasi Teknis dan Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota	Terkumpulnya Data Profil Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
	Penguatan Program PIS PK	Terlaksananya Program PIS PK	1 Dokumen
	Sosialisasi dan Advokasi PHBS	Terlaksanya Konsultasi	59 Orang
	Kampanye Perilaku Hidup dan Bersih bagi pelajar	Terlaksannya Kampanye Perilaku Hidup bersih	1 Laporan
	Bimtek Pembinaan UKM Sekunder	Terlaksanannya Bimtek	13 Dokumen

SASARAN VI Meningkatkan Akses dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang berkualitas dan Merata			
No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian Kinerja
1	(2)	(3)	(4)
8	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan Pembangunan Puskesmas Tahap II Kab. Maybrat	Terbangunnya Puskesmas Tahap II Kabupaten Maybrat	100%
	Pembangunan Puskesmas Tahap II Kab. Manokwari Selatan	Terbangunnya Puskesmas Tahap II Kabupaten Manokwari Selatan	100%
9	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru- Pengadaan Tambahan Lahan RSUD Provinsi	Tersedianya Lahan RSUD Provinsi yang Sesuai Kebutuhan	100%
	Pembangunan RSUD Provinsi	Terlaksananya Pembangunan RSUD Provinsi Tahap V	100%
	Pelayanan Pengelolaan Darah Untuk OAP	Tersedianya Pembiayaan Pelayanan Darah OAP	100%
	10 Program Rujukan Kesehatan bagi orang Papua		
10	Rujukan Kesehatan Bagi OAP Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pembiayaan Rujukan Kesehatan bagi OAP Tingkat Provinsi	100%
	Sosialisasi Rujukan Kesehatan Bagi OAP Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi Pembiayaan Rujukan Kesehatan bagi OAP Tingkat Provinsi	100%
11	Program Bimdal Perencanaan dan Pendayagunaan Seleksi dan pengiriman tenaga kesehatan teladan	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang mengikuti seleksi	9 Orang
	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Dalam Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Provinsi Papua Barat	Terlaksananya Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Provinsi Papua Barat	35 Orang
	12 Program Pengiriman dan Pendisiplinan tenaga kesehatan ke distrik, Kampung terpencil dan terisolir Menempatkan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan terpenuhi	1 Orang
13	Program Rujukan Kesehatan bagi orang Papua Pelatihan fungsional dan manajemen Kesehatan	Terlaksana Pelatihan fungsional dan manajemen Kesehatan	35 Orang
	Bantuan Beasiswa Tenaga Kesehatan	Tersedia Bantuan Beasiswa Tenaga Kesehatan	18 Orang
	Pendidikan bagi calon tenaga dokter spesialis dan Nakes lain untuk RS Rujukan Papua Barat	Tersedia Pendidikan bagi calon tenaga dokter spesialis dan Nakes lain untuk RS Rujukan Papua Barat	3 Orang
	Pembangunan Pagar BAPELKES	Terlaksana Pembangunan Pagar BAPELKES	1 Unit
	14 Program Bimdal Pendidikan dan Pelatihan Bimbingan Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Terlaksana Pelatihan fungsional dan manajemen Kesehatan	13 Kab/ Kota
	Pengadaan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM)	Tersedia Bantuan Beasiswa Tenaga Kesehatan	10 Kit
	Sosialisasi dan Advokasi Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Tersedia Pendidikan bagi calon tenaga dokter spesialis dan Nakes lain untuk RS Rujukan Papua Barat	80 Orang
	Surveillance Penyakit Tidak Menular	Terlaksana Pembangunan Pagar BAPELKES	38 Orang

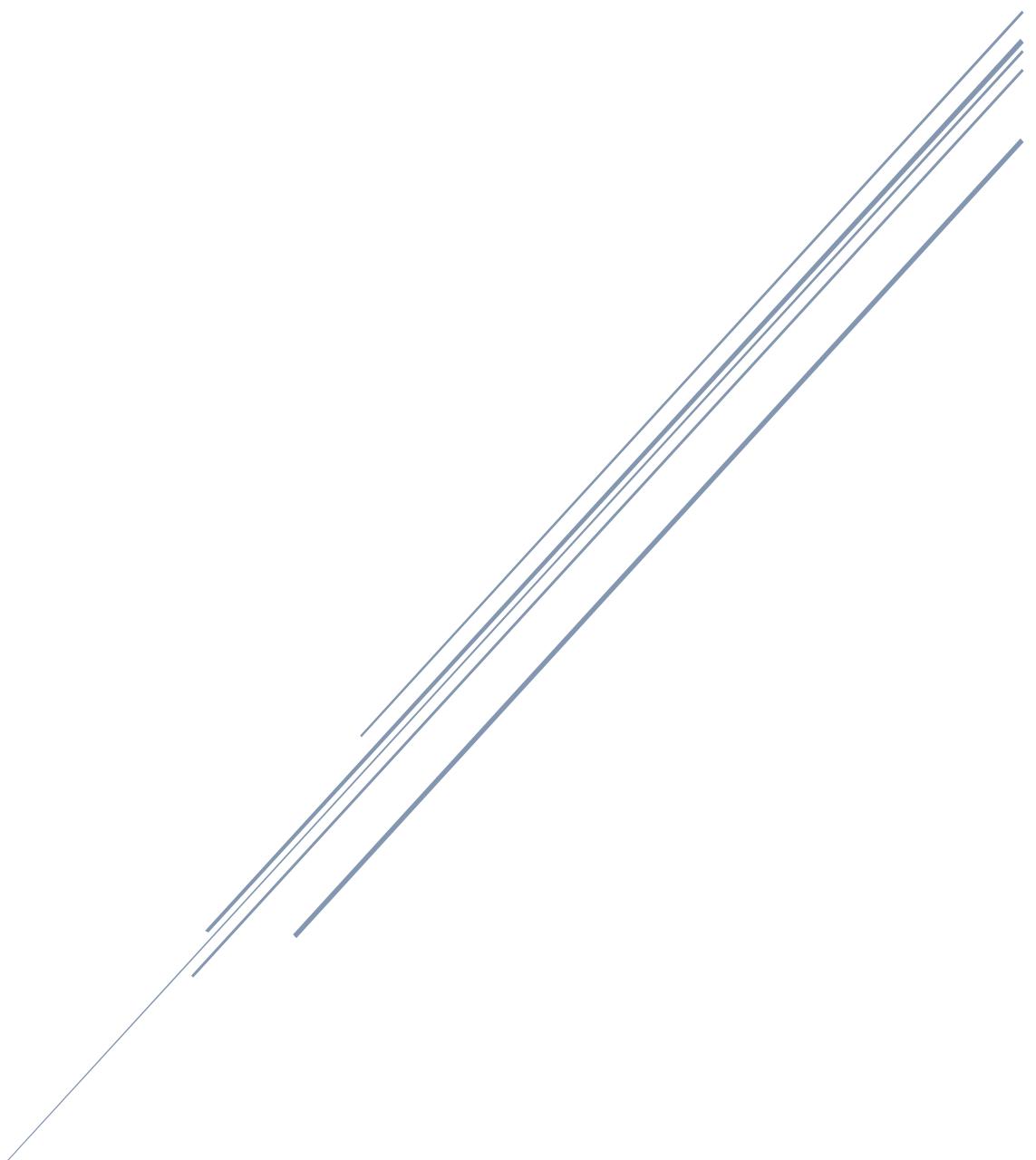
2. Indikator Kinerja Utama

Adalah Untuk mengukur capaian Indikator Pada RPJMD Papua Barat 2017-2022, untuk memudahkan disusunlah Indicator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Bidang Kesehatan , seperti di tuangkan pada tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2016)	TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA									
				2017		2018		2019		2020		2021	
				TARGET	CAPAIAN								
1	Jumlah Kematian Ibu OAP	Absolut	49 Perkelahiran Hidup (OAP = 35)	45(30)		40(25)		35(20)		30(15)		25(10)	
2	Jumlah Kematian Anak OAP	Absolut	185 Perkelahiran Hidup (OAP = 150)	180(145)		175(140)		170(135)		165(130)		160(125)	
3	Prevalensi HIV/AIDS	Persen (%)	2,70	2		1,9		1,8		1,7		1,6	
4	Rasio Tenaga Kesehatan, Dokter, Tenaga Medis persatuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	TK : 0,59; D : 0,21; TM : 0,38	TK : 0,76; D : 0,38; TM : 0,38		TK : 1,05; D : 0,52; TM : 0,53		TK : 1,32; D : 0,65; TM : 0,67		TK : 1,57; D : 0,77; TM : 0,80		TK : 1,81; D : 0,89; TM : 0,92	
5	Cakupan Jumlah Puskesmas Terakreditasi di Distrik	Persen (%)	3	10		29		49		68		87	
6	Jumlah RSUD Rujukan Provinsi	Unit	2	2		2		3		4		4	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

LAKIP 2018



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Pelaporan akuntabilitas kinerja ini dituangkan melalui evaluasi dan analisis kinerja atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

Evaluasi kinerja bertujuan agar pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi dapat diketahui sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Sedangkan analisis kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Analisis dilaksanakan terhadap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, serta penyebab untuk mencari strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan. Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja dilakukan Dengan menggunakan Indikator Kinerja pada Level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan Indikator Kinerjanya, sehingga menghasilkan Sasaran berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan dapat dilihat Jelas. Agara dapat dilakukan Analisis terhadap hasil Kinerja Dinas Kesehatan Papua Barat, maka sesuai dengan Kesepakatan pada saat penyusunan Rencana Kinerja di awal tahun telah ditetapkan standar Pencapaian sebagai berikut :

Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
81 - 100	Tercapai/ Berhasil
61 - 80	Cukup Tercapai/ Cukup Berhasil
41 - 60	Kurang Tercapai/ Kurang berhasil
≤ 40	Tidak Tercapai/ Tidak Berhasil

Nilai Realisasi Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan Realisasi Sebagai berikut :

Apabila Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

B. CAPAIAN SASARAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018

Berikut ini merupakan gambaran umum Pencapaian sasaran Kinerja Organisasi Pada Dinas Dinas

Kesehatan Papua Barat tahun 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel III. 1 . Pencapaian Kinerja sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2018

SASARAN I MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN APBD					
No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian Kinerja	Reaisasi capaian	Reaisasi capaian %
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				90%
	Tersediaanya Jasa Surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	1328	1328	100%
	Tersediaanya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi , sumber daya air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Tersediannya Jasa Adminitrasii Keuangan	Terpenuhinya pertanggungjawaban dan laporan keuangan yang lengkap	12 bulan	12 Bulan	100%
	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	terpeliharannya kebersihan kantor	2080 Orang	2080 Orang	100%
	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	48 Jenis	48 Jenis	100%
	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhanbarang cetakan dan Penggandaan	6 Jenis	6 Jenis	100%
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi	5 Komponen	5 Komponen	100%
	Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	400	160	100%
	Tersediannya Makanan dan Minuman untuk kegiatan penunjang lainnya	Terpenuhinya makanan da minuman untuk kegiatan penunjang lainnya	720 Orang	720 Orang	100%
	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	terpenuhinya kebutuhan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 bulan	12 Bulan	100%
	Tersediaanya database SDM Kesehatan	Dokumen hasil pemutahiran Data Pegawai	13 Kab/ Kota	0	0%

SASARAN II Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur					
No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian Kinerja	Reaisasi capaian	Reaisasi capaian %
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				80%
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional tersedia	6 Unit	6 Unit	100%
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peralatan kantor	1 Jenis	0	0%
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Perlengkapan Kantor	10 Jenis	10 Jenis	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional terpelihara	82 Unit	82 Unit	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan kantor terpelihara	3 Jenis	3 Jenis	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (perlengkapan kantor) terpenuhi	100%	100%	100%
	Pengadaan Pendaratan Medical Boat	Tersedianya Pendaratan Untuk Medical Boat	1 Unit	1 Unit	100%
	Pengukuran Lahan dan Pembuatan Sertifikat Lahan	Tersedianya Sertifikat Lahan	1 Lahan	0	0%
	Pengadaan Pintu Harmonika Gedung Reaksi Cepat	Pintu Harmonika Gedung Reaksi Cepat Tersedia	3 Pintu	3 Pintu	100%

SASARAN III Meningkatkan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur					
No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian Kinerja	Reaisasi capaian	Reaisasi capaian %
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				60%
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	528 Stell	528 Stell	100%
	Tersedianya Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	Terpenuhinya Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	283 Stell	283 Stell	100%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	Terlaksannya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Kegiatan	312 Orang	312 Orang	100%
	Terlaksananya Bimtek Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta Kegiatan	6 Orang	0	0%
	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah di bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen yang tersusun	1 Dokumen	0	0%

SASARAN IV Meningkatkan Kualitas Sistem Pelaporan					
No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian Kinerja	Reaisasi capaian	Reaisasi capaian %
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan				90%
	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Laporan Kualitas Rencana Kerja Dinas Kesehatan	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Per Triwulan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Penyusunan dan Sosialisasi SKP ASN	Tersusunnya Profesionalisme Aparatur (Presensi dan Pelaksanaan SKP)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)	Tersedianya Renja,RKA Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Nilai LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Kesenjangan anggaran kas dan realisasi Anggaran dinas Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Rapat Koordinasi Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	Dokumen Perencanaan DAK Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota dan RSUD	1 Kegiatan	0%	0%
	Rapat Kerja Kesehatan Daerah	Terlaksananya Raker Bidang Kesehatan se-Provinsi Papua Barat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	Hari Kesehatan Nasional	Hari Kesehatan Nasional	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

SASARAN V Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat					
No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian Kinerja	Reaisasi capaian	Reaisasi capaian %
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				90%
	Pengadaan Buffer Stok Obat dan Bahan Pakai Habis	Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 100%	100%	100%	100%
	Distribusi Obat, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin	Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 100%	13 Kab/ Kota	13 Kab/ Kota	100%
	DAK Farmasi	ketersediaan Operasioan Farmasi 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pembangunan / Penataan Halaman Instalasi Farmasi	Terwujudnya Halamam IFP yang tertata dan bersih	1 Lahan	1 Lahan	100%
	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Lanjutan)	Tersedianya Buffer Stock Obat Provinsi	1 Penyedia	1 Penyedia	100%
	Penyediaan Program Aplikasi Perkantoran	Tersedianya Aplikasi Inventory Barang	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%
7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				
	Rapat Koordinasi Teknis dan Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi	Terkumpulnya Data Profil Kesehatan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Rapat Koordinasi Teknis dan Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota	Terkumpulnya Data Profil Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penguatan Program PIS PK	Terlaksananya Program PIS PK	1 Dokumen	0	0%
	Sosialisasi dan Advokasi PHBS	Terlaksanya Konsultasi	59 Orang	59 Orang	100%
	Kampanye Perilaku Hidup dan Bersih bagi pelajar	Terlaksannya Kampanye Perilaku Hidup bersih	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Bimtek Pembinaan UKM Sekunder	Terlaksanannya Bimtek	13 Dokumen	13 Dokumen	100%

SASARAN VI Meningkatkan Akses dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang berkualitas dan Merata					
No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian Kinerja	Reaisasi capaian	Reaisasi capaian %
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan				
	Pembangunan Puskesmas Tahap II Kab. Maybrat	Terbangunnya Puskesmas Tahap II Kabupaten Maybrat	100%	100%	100%
	Pembangunan Puskesmas Tahap II Kab. Manokwari Selatan	Terbangunnya Puskesmas Tahap II Kabupaten Manokwari Selatan	100%	100%	100%
9	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-				
	Tersedianya Lahan RSUD Provinsi yang Sesuai Kebutuhan	adanya lahan RSUD Provinsi	100%	0	0%
	Terlaksananya Pembangunan RSUD Provinsi Tahap V	Terlaksananya Pembangunan RSUD Provinsi Tahap V	100%	100%	100%
	Tersedianya Pembiayaan Pelayanan Darah OAP	Tersedianya Pembiayaan Pelayanan Darah OAP	100%	0	0%
10	Program Rujukan Kesehatan bagi orang Papua				
	Rujukan Kesehatan Bagi OAP Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pembiayaan Rujukan Kesehatan bagi OAP Tingkat Provinsi	100%	100%	100%
	Sosialisasi Rujukan Kesehatan Bagi OAP Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi Pembiayaan Rujukan Kesehatan bagi OAP Tingkat Provinsi	100%	100%	100%
	Pembiayaan Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Penduduk OAP Dalam Rangka Menjaga Keberlangsungan UHC	Terjalannya Keberlangsungan UHC	81557 Jiwa	74469 Jiwa	91%
11	Program Bimdal Perencanaan dan Pendayagunaan				
	Seleksi dan pengiriman tenaga kesehatan teladan	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang mengikuti seleksi	9 Orang	0	0%
	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Dalam Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Provinsi Papua Barat	Terlaksananya Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Provinsi Papua Barat	35 Orang	35 Orang	100%
12	Program Pengiriman dan Pendisiplinan tenaga kesehatan ke distrik, Kampung terpencil dan terisolir				
	Menempatkan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan terpenuhi	1 Orang	0	0%
13	Program Rujukan Kesehatan bagi orang Papua				
	Pelatihan fungsional dan manajemen Kesehatan	Terlaksana Pelatihan fungsional dan manajemen Kesehatan	35 Orang	0	0%
	Bantuan Beasiswa Tenaga Kesehatan	Tersedia Bantuan Beasiswa Tenaga Kesehatan	18 Orang	18 Orang	100%
	Pendidikan bagi calon tenaga dokter spesialis dan Nakes lain untuk RS Rujukan Papua Barat	Tersedia Pendidikan bagi calon tenaga dokter spesialis dan Nakes lain untuk RS Rujukan Papua Barat	3 Orang	3 Orang	100%
	Pembangunan Pagar BAPELKES	Terlaksana Pembangunan Pagar BAPELKES	1 Unit	1 Unit	100%
14	Program Bimdal Pendidikan dan Pelatihan				
	Bimbingan Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Terlaksana Pelatihan fungsional dan manajemen Kesehatan	13 Kab/ Kota	0	0%
	Pengadaan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM)	Tersedia Bantuan Beasiswa Tenaga Kesehatan	10 Kit	10	100%
	Sosialisasi dan Advokasi Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Tersedia Pendidikan bagi calon tenaga dokter spesialis dan Nakes lain untuk RS Rujukan Papua Barat	80 Orang	80 Orang	100%
	Surveillance Penyakit Tidak Menular	Terlaksana Pembangunan Pagar BAPELKES	38 Orang	38 Orang	100%

Dari Tabel III. 1 tersebut diatas terlihat bahwa tahun 2018, dari 6 kelompok Sasaran, terdapat 14 sasaran kegiatan yang tidak mencapai target, yaitu :

1. Tersediaanya database SDM Kesehatan, dengan capaian 0 dari target di 13 kabupaten/ Kota di Papua Barat.
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dengan capaian 0 dari target 1 Unit
3. Pengukuran lahan dan pembuatan sertifikat lahan, dengan capaian 0 dari target 1 Lahan
4. Terlaksannya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan, dengan capaian 0 dari target 6 Orang
5. Peyusunan Peraturan daerah di Bidang kesehatan, dengan capain 0 dari target 1 Dokumen
6. Rapat Koordinasi teknis DAK Bidang Kesehatan, dengan capaian 0 dari target 1 Kegiatan
7. Terselenggaranya Penguatan Program PIS PK , dengan capaian 0 dari target 1 Dokumen
8. Tersediannya lahan RSUD Provinsi, dengan capaian 0 dari target 1 setifikat
9. Tersediannya pemberdayaan pelayanan darah OAP, 0 % dari target 100 %
10. Pemberdayaan luaran Peserta Jaminan Kesehatan Penduduk OAP dalam rangka menjaga keberlangsungan UHC, dengan capaian 74.469 Jiwa dari 81.557 Jiwa
11. Jumlah tenaga kesehatan teladan yang mengikuti seleksi, dengan capaian 0 Orang dari target 9 Orang
12. Terpenuhinya tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan capaian 0 Orang, dari target 1 Orang
13. Terlaksannya pelatihan fungsional dan manajemen kesehatan, dengan capaian 0 orang dari target 35 Orang
14. Bimbingan teknis Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, dengan capaian 0 dari 13 kab/ Kota.

Dengan tingkat akumulasi persentase setiap sasaran strategis sebagai berikut :

1. Sasaran I Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan APBD dengan persentase Realisasi Pencapaian sebesar 90 %
2. Sasaran II Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur dengan Persentase Realisasi Pencapaian 80 %
3. Sasaran III Meningkatkan Disiplin dan kapitas Sumber Daya Aparatur dengan Persentase Realisasasi Penceapaian sebesar 60 %
4. Sasaran IV Meningkatkan Kualitas system Pelaporan dengan persentase realisasi sebesar 90 %
5. Sasaran V Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dengan persentase realisasi sebesar 90 %
6. Sasaran VI Meningkatkan Akses dan ketersediaan sarana dan Prasarana kesehatan yang berkualitas dan merata dengan tinga persentase realiasasi sebesar 80 %

C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2018

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Men PAN dan RB no : PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi Indikator Keluaran (Output) dan hasil (Outcome).

Tujuan dalam penetapan IKU adalah untuk :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan Akutabilitas Kinerja.

Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Papua barat Tahun 2018 menggunakan metode yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Reviu

Atas

Laporan

Kinerja.

Tabel III. 2 . Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2018

TABEL C II.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENSTRA DINAS KESEHATAN MENGACU PADA RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2016)	2018	
				TARGET	CAPAIAN
1	Jumlah Kematian Ibu OAP	Absolut	49 Perkelahiran Hidup (OAP = 35)	40 (25)	40 (-)
2	Jumlah Kematian Anak OAP	Absolut	185 Perkelahiran Hidup (OAP = 150)	175 (140)	170 (135)
3	Prevalensi HIV/AIDS	Persen (%)	2,70	1,9	1,94%
4	Rasio Tenaga Kesehatan, Dokter, Tenaga Medis persatuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	TK : 0,59; D : 0,21; TM : 0,38	TK : 1,05; D : 0,52; TM : 0,53	TK : 4,43; D : 0,35; TM : 0,56
5	Cakupan Jumlah Puskesmas Terakreditasi di Distrik	Persen (%)	3	29	32,08
6	Jumlah RSUD Rujukan Provinsi	Unit	2	2	1

D. Analisis Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2018

a. Jumlah Kematian Ibu (OAP)

ID Wilayah	Nama Lokasi Wilayah	Kematian Ibu	Penyebab Kematian Ibu					
			Perdarahan	Hipertensi	Infeksi	Gangguan Darah	Gangguan Metabolik	Lain2
9101	Fakfak	4	0	1	2	0	0	1
9102	Kaimana	8	2	0	2	2	0	2
9103	Teluk Wondama	4	3	0	0	0	0	1
9104	Teluk Bintuni	1	0	1	0	0	0	0
9105	Manokwari	12	2	5	5	0	0	0
9106	Sorong Selatan	1	1	0	0	0	0	0
9107	Sorong	2	1	0	0	0	0	1
9108	Raja Ampat	5	2	3	0	0	0	0
9109	Tambraw	0	0	0	0	0	0	0
9110	Maybrat	1	0	0	0	1	0	0
9111	Manokwari Selatan	0	0	0	0	0	0	0
9112	Pegunungan Arfak	0	0	0	0	0	0	0
9171	Kota Sorong	2	1	0	0	0	0	1
Total		40	12	10	9	3	0	6

Dari Data Tabel diatas untuk Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Papua Barat tahun 2018 adalah sebanyak 40 orang ibu dengan jumlah penyebab kematian terbanyak adalah disebabkan oleh penyebab akibat pendarahan sebanyak 12 kasus dan terbanyak kedua adalah disebabkan oleh Hipertensi sebanyak 10 kasus. Kabupaten penyumbang kematian terbanyak adalah kabupaten Manokwari, mengingat kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak dengan keadaan geografis yang sulit diprediksi. Angka Kematian Ibu Orang Asli Papua belum dapat didata sebab pada layanan belum memisahkan pendataan antara Ibu OAP dan yang bukan OAP.

b. Jumlah Kematian Anak (OAP)

ID Wilayah	Nama Lokasi Wilayah	Lahir Mati	Kematian Neonatal			Penyebab Kematian Neonatal					
			0-6 hari	7-28 hari	0-28 hari	BBLR	Asfiksia	Tetanus	Sepsis	Kelainan	Lain2
9101	Fakfak	30	25	4	29	18	4	0	4	0	2
9102	Kaimana	10	7	5	12	2	3	0	1	2	6
9103	Teluk Wondama	8	2	3	5	5	0	0	0	0	0
9104	Teluk Bintuni	12	19	3	22	7	3	0	1	2	6
9105	Manokwari	4	7	1	8	5	2	0	1	0	0
9106	Sorong Selatan	10	7	3	10	3	2	0	0	0	2
9107	Sorong	7	13	0	13	3	8	0	0	1	1
9108	Raja Ampat	5	7	0	7	3	1	0	2	0	1
9109	Tambraw	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9110	Maybrat	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0
9111	Manokwari Selatan	1	6	1	7	1	4	0	0	0	2
9112	Pegunungan Arfak	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0
9171	Kota Sorong	5	33	2	35	15	10	1	4	0	3
Total		97	128	22	150	63	38	1	13	5	23

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa Jumlah Kematian Neonatus di Provinsi Papua Barat tahun 2018 umur 0 - 28 hari adalah 150 Bayi, dengan jumlah penyebab kematian terbanyak adalah disebabkan oleh penyebab akibat BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) sebanyak 63 kasus dan terbanyak kedua adalah disebabkan oleh Asfiksia (Kondisi Kekurangan Oksigen Pada Pernapasan) sebanyak 38 kasus. Angka Kematian Bayi Orang Asli Papua (OAP) belum dapat didata sebab pada layanan belum memisahkan pendataan antara Bayi OAP dan Bukan OAP.

c. Prevalensi HIV/AIDS

Jumlah kasus HIV yang ditemukan dan dilaporkan masih jauh dari jumlah kasus HIV yang diperkirakan, hal ini juga diperkuat dengan jumlah klien yang berkunjung di tahun 2018 sejumlah 24.940 orang sementara yang dilakukan test berjumlah 22.142 orang. Belum semua orang yang terdiagnosis HIV mendapatkan terapi ARV, ditahun 2018 dari jumlah HIV (+) sebanyak 427 orang yang diobati hanya 297 orang, disamping permasalahan lainnya seperti masih tingginya angka putus obat ARV dan masih banyak pula yang belum mulai pengobatan.

d. Rasio Tenaga Kesehatan, Dokter, dan Tenaga Medis persatuan penduduk

Dari Tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Jumlah Tenaga Medis di Tahun 2018 terutama Jumlah Dokter Umum masih rendah bila dibandingkan dengan Jumlah Penduduk (Per 1.000 satuan Penduduk), hal ini sudah diatasi dengan kerjasama Pemerintah Daerah dan Kementerian Kesehatan dengan adanya Nusantara Sehat yang sudah berjalan demi mendukung kebutuhan Tenaga Medis yang belum ada di Pelayanan Dasar / Puskesmas. Selain itu walaupun secara umum Jumlah Tenaga Kesehatan sudah dinilai tinggi namun penyebaran di kabupaten/kota se Provinsi Papua Barat yang belum merata. Rasio Tenaga Medis, Dokter Umum dan Tenaga Kesehatan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

e. Cakupan Jumlah Puskesmas Terakreditasi di Distrik

Tujuan utama akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu, system penyelenggaraan pelayanan serta program dan penerapan manajemen risiko. Jumlah Puskesmas di Papua Barat sampai dengan tahun 2018 berjumlah 159 Puskesmas dimana terdapat penambahan 4 Puskesmas Baru yang telah teregristrasi pada Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI dari Total 155 Puskesmas di Tahun 2017.

f. Jumlah Rumah Sakit Rujukan Provinsi

Sampai dengan 31 Desember 2018, Rumah Sakit Umum Rujukan Provinsi masih dalam tahap pembangunan. Berbagai hambatan banyak dialami terutama terhadap anggaran yang minim dan didukung hanya dengan sumber anggaran daerah (APBD). Target Operasional Rumah Sakit di laksanakan pada Tahun 2020 sehingga penerimaan SDM harus sudah dilaksanakan di Tahun 2019.

E. Analisis Realisasi Kinerja Utama Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2018 dengan Tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indicator utama peiode Tahun sebelumnya (Tahun 2017) ada penurunan target di 3 Indikator Kinerja Utama, seperti diuraikan pada table berikut :

Tabel III. 3 Perbandingan Target dan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 dan Tahun 2017

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2016)	TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA									
				2017		2018		2019		2020		2021	
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Jumlah Kematian Ibu OAP	Absolut	49 Perkelahiran Hidup (OAP = 35)	45 (30)	44 (-)	40 (25)	40 (-)	35 (20)		30 (15)		25 (10)	
2	Jumlah Kematian Anak OAP	Absolut	185 Perkelahiran Hidup (OAP = 150)	180 (145)	175 (-)	175 (140)	170 (135)	170 (135)		165 (130)		160 (125)	
3	Prevalensi HIV/AIDS	Persen (%)	2,70	2	2,3	1,9	1,94%	1,8		1,7		1,6	
4	Rasio Tenaga Kesehatan, Dokter, Tenaga Medis persatuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	TK : 0,59; D : 0,21; TM : 0,38	TK : 0,76; D : 0,38; TM : 0,38	TK : 4,95; D : 0,35; TM : 0,65	TK : 1,05; D : 0,52; TM : 0,53	TK : 4,43; D : 0,35; TM : 0,56	TK : 1,32; D : 0,65; TM : 0,67		TK : 1,57; D : 0,77; TM : 0,80		TK : 1,81; D : 0,89; TM : 0,92	
5	Cakupan Jumlah Puskesmas Terakreditasi di Distrik	Persen (%)	3	10	23,87	29	32,08	49		68		87	
6	Jumlah RSUD Rujukan Provinsi	Unit	2	2	2	2	1	3		4		4	

1) Analisis terhadap Indikator Jumlah Kematian Ibu Tahun 2018 dan 2017.

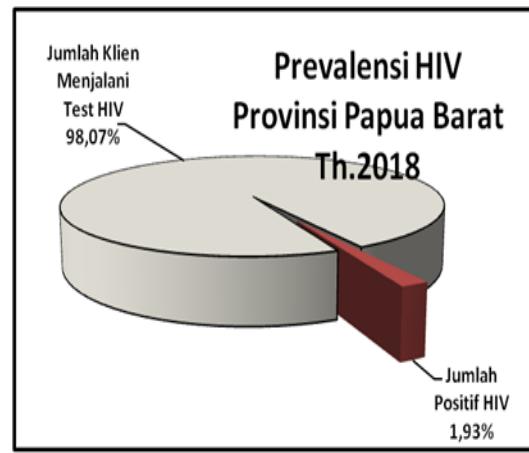
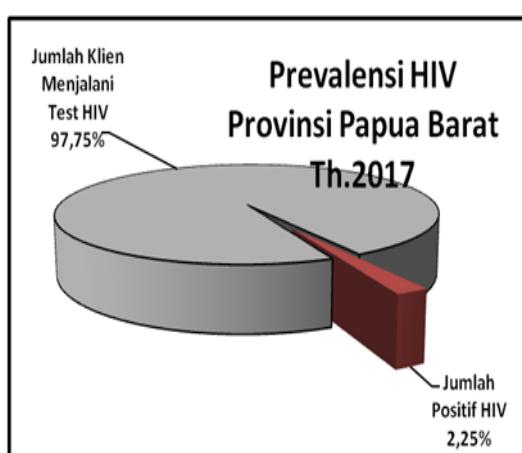
Dari data Tabel diatas untuk Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Papua Barat tahun 2018 mengalami penurunan di banding Tahun 2017 yakni sebanyak 40 orang ibu, sementara di Tahun 2017 jumlah kematian ibu berjumlah 44 Orang.

yang sulit diprediksi. Angka Kematian Ibu Orang Asli Papua (OAP) belum dapat didata sebab pada layanan belum memisahkan pendataan antara Ibu OAP dan yang bukan OAP.

2) Analisis terhadap indicator Jumlah Kematian Bayi Tahun 2018 dan 2017.

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa Jumlah Kematian Neonatus (Bayi Baru Lahir) di Provinsi Papua Barat tahun 2018 umur 0 - 28 hari adalah 170 Bayi atau mengalami penurunan dibandingakn dengan angka kematian bayi di tahun 2017 yang berjumlah 175 Bayi. Angka Kematian Bayi Orang Asli Papua (OAP) belum dapat didata sebab pada layanan belum memisahkan pendataan antara Bayi OAP dan Bukan OAP.

3) Analisis terhadap indicator Jumlah Pravelence HIV/ AIDS Tahun 2018 dan 2017



Dari grafik diatas Papua Barat menunjukkan adanya perubahan prevalensi yang baik di Tahun 2018 di banding Tahun 2017, walaupun masih jauh menuju target nasional yaitu <0,5% pada Renstra Kementerian Kesehatan. Hal yang perlu dilakukan yaitu Pendekatan kebijakan test and treat, yaitu segera memulai terapi ARV apabila terdiagnosa HIV positif perlu dilaksanakan oleh semua fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki dokter dengan memanfaatkan sistem rujukan sesuai ketentuan. Pelaksanaan SPM bidang kesehatan kabupaten/kota sebagai tolak ukur perlindungan masyarakat terhadap ancaman HIV perlu segera dilakukan dan pengelolaan sediaan farmasi yang lebih maksimal.

- 4) Analisis terhadap indicator terhadap Rasio Jumlah tenaga kesehatan persatuan penduduk tahun 2018 dan 2017.

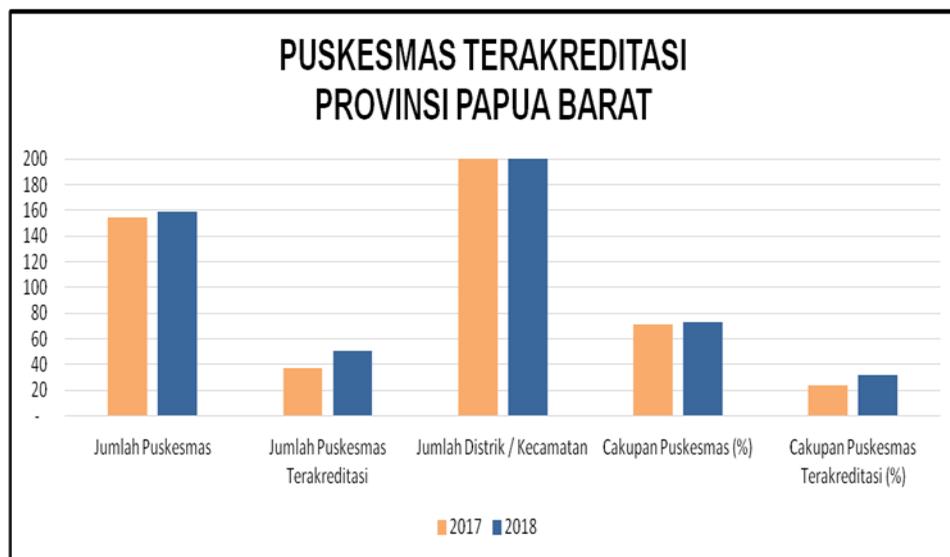
Rasio Tenaga Medis, Dokter Umum dan Tenaga Kesehatan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**RASIO TENAGA KESEHATAN PER SATUAN PENDUDUK
PROVINSI PAPUA BARAT**

No.	Uraian	2017	2018
1	Jumlah Tenaga Medis	597	529
2	Jumlah Dokter Umum	316	326
3	Jumlah Tenaga Kesehatan	4.535	4.154
4	Jumlah Penduduk	915.361	937.458
	Rasio Tenaga Medis Per satuan Penduduk	0,65	0,56
	Rasio Dokter Umum Per satuan Penduduk	0,35	0,35
	Rasio Tenaga Kesehatan Per satuan Penduduk	4,95	4,43

Dari Tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Jumlah Tenaga Medis di Tahun 2018 mengalami penurunan di bandingkan tahun 2017, sedangkan Jumlah Dokter Umum masih rendah walaupun ada kenaikan Jumlah dibandingkan dengan tahun 2017 dan juga bila dibandingkan dengan Jumlah Penduduk (Per 1.000 satuan Penduduk), tapi hal ini sudah diatasi dengan kerjasama Pemerintah Daerah dan Kementerian Kesehatan dengan adanya Nusantara Sehat yang sudah berjalan demi mendukung kebutuhan Tenaga Medis yang belum ada di Pelayanan Dasar / Puskesmas

- 5) Analisis Terhadap Indikator cakupan Puskesmas Terakreditasi Tahun 2018 dan Tahun 2017.



Dari grafik diatas dapat dilihat adanya peningkatan jumlah puskesmas yang terakreditasi, dimana dari total 155 Puskesmas di tahun 2017, puskesmas yang telah terakreditasi berjumlah 37 Puskesmas, meningkat ditahun 2018 dengan jumlah 51 Puskesmas yang terdiri dari : 27 Puskesmas Terakreditasi Dasar, 23 Puskesmas Terakreditasi Madya dan 1 Puskesmas Terakreditasi Utama. Cakupan Puskesmas yang terakreditasi di Distrik juga meningkat dimana ditahun 2017 sebesar 23,87% dan ditahun 2018 capaian sebesar 32,08% dengan target sebesar 29,00%. Walaupun nilai persentase tersebut masih tergolong kecil namun dapat kita yakini adanya

peningkatan mutu kinerja yang berkesinambungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas.

Adanya peningkatan jumlah puskesmas yang terakreditasi di tahun 2018 bila dibandingkan dengan tahun 2017 begitu pula dengan pencapaian target ditahun 2018 dimana dari target 46 Puskesmas di tahun 2018 tercapai sejumlah 51 Puskesmas yang terakreditasi, hal ini tidak menjadi kebanggaan bila kita melihat secara umum jumlah puskesmas yang belum terakreditasi sesuai yang terlihat pada grafik diatas. Dari 159 Puskesmas terdapat 108 Puskesmas yang belum terakreditasi di tahun 2018, disertai dengan 95 Puskesmas yang belum dilatih Manajemen Puskesmas dan 90 Puskesmas yang belum dilatih Keluarga Sehat sehingga dapat disimpulkan bahwa masih banyak puskesmas yang belum dapat diukur penilaian kualitas pelayanan kesehatannya dan kemampuan dalam memberikan kepuasan bagi masyarakat dimana merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi pemerintah.

6) Analisis terhadap Jumlah RSUD Rujukan Tahun 2018 dan 2017

Sampai dengan per tanggal 31 Desember 2018 RSUD Rujukan Provinsi, masih dalam Tahap Pembangunan dan diharapkan akan selesai dan dapat digunakan di Tahun 2020.

F. Realisasi Anggaran

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat daerah (OPD), berikut adalah Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018 pada Dinas Kesehatan Papua Barat bisa dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel III. 3 Alokasi dan Realisasi anggaran pada Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2018

Nº	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	3	Rp	Rp	
BELANJA LANGSUNG				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.742.292.100,00	4.185.645.853,00	73%
	Penyediaan jasa surat menyurat	22.722.000,00	13.122.000,00	58%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.271.380.000,00	626.938.640,00	49%
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.046.690.000,00	1.655.349.000,00	81%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	146.564.000,00	80.032.200,00	55%
	Penyediaan alat tulis kantor	197.543.000,00	197.543.000,00	100%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	155.762.500,00	155.759.200,00	100%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25.980.000,00	25.980.000,00	100%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	230.000.000,00	141.210.000,00	61%
	Penyediaan makanan dan minuman	91.800.000,00	88.150.978,00	96%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.421.750.000,00	1.201.560.835,00	85%
	Pemutakhiran Data Program dan Kepegawaiuan	132.100.600,00	0,00	0%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.711.551.590,00	3.401.167.426,00	92%
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	675.000.000,00	592.829.090,00	88%
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	4.500.000,00	0,00	0%
	Pengadaan peralatan gedung kantor	836.178.650,00	833.000.000,00	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	911.500.000,00	821.295.836,00	90%
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	57.765.700,00	43.265.000,00	75%
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	47.400.000,00	12.090.500,00	26%
	Pengadaan Pendaratan Medical Boat	1.009.207.240,00	1.008.887.000,00	100%
	Pengukuran Lahan dan Pembuatan Sertifikat Lahan	80.000.000,00	0,00	0%
	Pengadaan Pintu Harmonika Gedung Reaksi Cepat	90.000.000,00	89.800.000,00	100%

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	3	Rp	Rp	
3	Program peningkatan disiplin aparatur	302.010.000,00	301.786.000,00	100%
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	202.960.000,00	202.736.000,00	100%
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	99.050.000,00	99.050.000,00	100%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	781.608.200,00	467.463.400,00	60%
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	488.925.200,00	467.463.400,00	96%
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	135.000.000,00	0,00	0%
	Penyusunan Peraturan Daerah di bidang Kesehatan	157.683.000,00	0,00	0%
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.029.472.700,00	783.094.700,00	39%
	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	34.565.000,00	34.565.000,00	100%
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	33.977.000,00	33.977.000,00	100%
	Penyusunan dan Sosialisasi SKP ASN	153.751.600,00	150.286.200,00	98%
	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)	43.927.500,00	43.927.500,00	100%
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	33.759.000,00	33.759.000,00	100%
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	17.655.000,00	17.655.000,00	100%
	Rapat Koordinasi Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	167.897.600,00	0,00	0%
	Rapat Kerja Kesehatan Daerah	1.075.015.000,00	0,00	0%
	Hari Kesehatan Nasional	468.925.000,00	468.925.000,00	100%

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	3	Rp	Rp	
6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	8.252.377.710,04	5.964.946.986,00	72%
	Pengadaan Buffer Stock Obat dan Bahan habis pakai	3.820.145.780,00	2.201.017.236,00	58%
	Distribusi Obat dan Vaksin ke Kabupaten/Kota	1.300.009.170,04	1.136.620.000,00	87%
	DAK Farmasi	850.055.000,00	831.994.090,00	98%
	Pembangunan/Penataan Halaman Instalasi Farmasi	1.910.000.000,00	1.423.575.000,00	75%
	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Lanjutan)	72.167.760,00	72.167.760,00	100%
	Penyediaan Program Aplikasi Perkantoran	300.000.000,00	299.572.900,00	100%
7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2.568.245.100,00	2.281.292.108,00	89%
	Rapat Koordinasi Teknis dan Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi	39.352.500,00	39.352.500,00	100%
	Rapat Koordinasi Teknis dan Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota	135.439.600,00	117.613.738,00	87%
	Penguatan Program PIS PK	195.151.400,00	0,00	0%
	Sosialisasi dan Advokasi PHBS	302.391.600,00	263.515.895,00	87%
	Kampanye Perilaku Hidup Sehat dan Bersih Bagi Pelajar	858.760.000,00	850.657.800,00	99%
	Bimtek Pembinaan UKM Sekunder dan Primer	1.037.150.000,00	1.010.152.175,00	97%
8	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pustekmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	13.390.000.000,00	12.442.591.994,00	93%
	Pembangunan Puskesmas Tahap II Kab. Maybrat	7.725.000.000,00	7.326.776.994,00	95%
	Pembangunan Puskesmas Tahap II Kab. Manokwari Selatan	5.665.000.000,00	5.115.815.000,00	90%

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	3	Rp	Rp	
9	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	44.610.000.000,00	40.487.703.000,00	91%
	Pengadaan Tambahan Lahan RSUD Provinsi	1.538.000.000,00	0,00	0%
	Pembangunan RSUD Provinsi	41.072.000.000,00	40.487.703.000,00	99%
	Pelayanan Pengelolaan Darah Untuk OAP	2.000.000.000,00	0,00	0%
10	Program Rujukan Kesehatan bagi orang Papua	20.808.573.100,00	19.220.100.000,00	92%
	Rujukan kesehatan bagi orang Papua	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100%
	Sosialisasi Rujukan Kesehatan Bagi Orang Papua tingkat Provinsi	50.463.100,00	0,00	0%
	Pembiayaan Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Penduduk OAP Dalam Rangka Menjaga Keberlangsungan UHC	18.758.110.000,00	17.220.100.000,00	92%
11	Program Bimdal Perencanaan dan Pendayagunaan	168.973.000,00	39.123.000,00	23%
	Seleksi dan pengiriman tenaga kesehatan teladan	129.850.000,00	0,00	0%
	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Dalam Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Provinsi Papua Barat	39.123.000,00	39.123.000,00	100%

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	3	Rp	Rp	
12	Program pengiriman dan pendisiplinan tenaga kesehatan ke distrik, kampung terpencil dan terisolir	13.800.000,00	0,00	0%
	Menempatkan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13.800.000,00	0,00	0%
13	Program Bimdal Pendidikan dan Pelatihan	2.797.714.500,00	2.491.035.000,00	89%
	Pelatihan fungsional dan manajemen Kesehatan	170.314.500,00	0,00	0%
	Bantuan Beasiswa Tenaga Kesehatan	198.000.000,00	187.000.000,00	94%
	Pendidikan bagi calon tenaga dokter spesialis dan Nakes lain untuk RS Rujukan Papua Barat	375.000.000,00	250.000.000,00	67%
	Pembangunan Pagar BAPELKES	2.054.400.000,00	2.054.035.000,00	100%
14	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	755.410.000,00	533.244.774,00	71%
	Bimbingan Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	185.438.000,00	0,00	0%
	Pengadaan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM)	83.421.000,00	73.405.000,00	88%
	Sosialisasi dan Advokasi Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	233.865.000,00	233.865.000,00	100%
	Surveillance Penyakit Tidak Menular	252.686.000,00	225.974.774,00	89%
		105.932.028.000,04	92.121.112.306,00	87%

G. Prestasi Tahun 2018

Berapa Prestasi yang diraih Dinas kesehatan Papua Barat di Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

1. Piagam Penghargaan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat atas partisipasi dalam mendukung pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN)



2. Piagam Penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas Pemantauan Penggunaan Kelambu anti Nyamuk secara serentak dengan Jumlah Terbanyak.



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.linstansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara, wajib untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis (Renstra) yang telah ditetapkan Instansi..

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2018 mengambarkan pencapaian kinerja selama Tahun 2018. Pencapaian kinerja berupa pelaksanaan kegiatan ini disusun dan dilaksanakan berdasarkan Rencana Kinerja tahun 2018 yang mengacu pada rencana strategis 2017 – 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat melaksanakan 67 (Enam Puluh Tujuh kegiatan dalam 14 (Empat Belas) program untuk memenuhi 6 (Enam) sasaran strategis sesuai dengan rencana kinerja tahun 2018.

Total Pagu Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan sasaran strategis tersebut sebesar Rp.105.932.028.004,- (Seratus Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Puluh Delapan Ribu Koma Nol Empat Rupiah) dari jumlah tersebut di atas realisasi serapannya sebesar Rp.92.121.112.306,- (Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah) atau 87% dari anggaran yang tersedia, dengan uraian sasaran strategis dengan persentasenya sebagai berikut:

1. Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelola APBD (90 %)
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (80 %)
3. Meningkatkan disiplin dan Kapasitas sumber daya aparatur (60 %)
4. Meningkatnya system Pelaporan (90 %)
5. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Mayarakat (90 %)
6. Meningkatkan Akses dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas dan merata (80 %)

Kurang Optimalnya tingkat penyerapan anggaran

1. Kurangnya kuantitas dan Kualitas ASN khususnya dalam pengelolaan keuangan pada OPD Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
 2. Tidak berjalannya Sistem Pengendalian Interen (SPI) dan belum dibuatnya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pada OPD Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.
- b. Strategi pemecahan masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang telah didentifikasi tersebut, strategi pemecahan masalah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan Kualitas aparat dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dengan melakukan penempatan ASN sesuai dengan disiplin ilmu dan kebutuhan.
2. membuat Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) baik untuk kegiatan Admintrasi Umum ataupun Kegiatan Teknis sehingga lebih memudahkan dalam hal Evaluasi dan Monitoring pengelolaan Anggaran OPD Dinas Kesehatan Papua Barat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat ini dibuat, kekurangan dan kelemahan semoga bapak dan ibu sekalian berkenan

memberikan kritik dan saran agar kami dapat memperbaiki laporan ini di tahun-tahun yang akan datang.

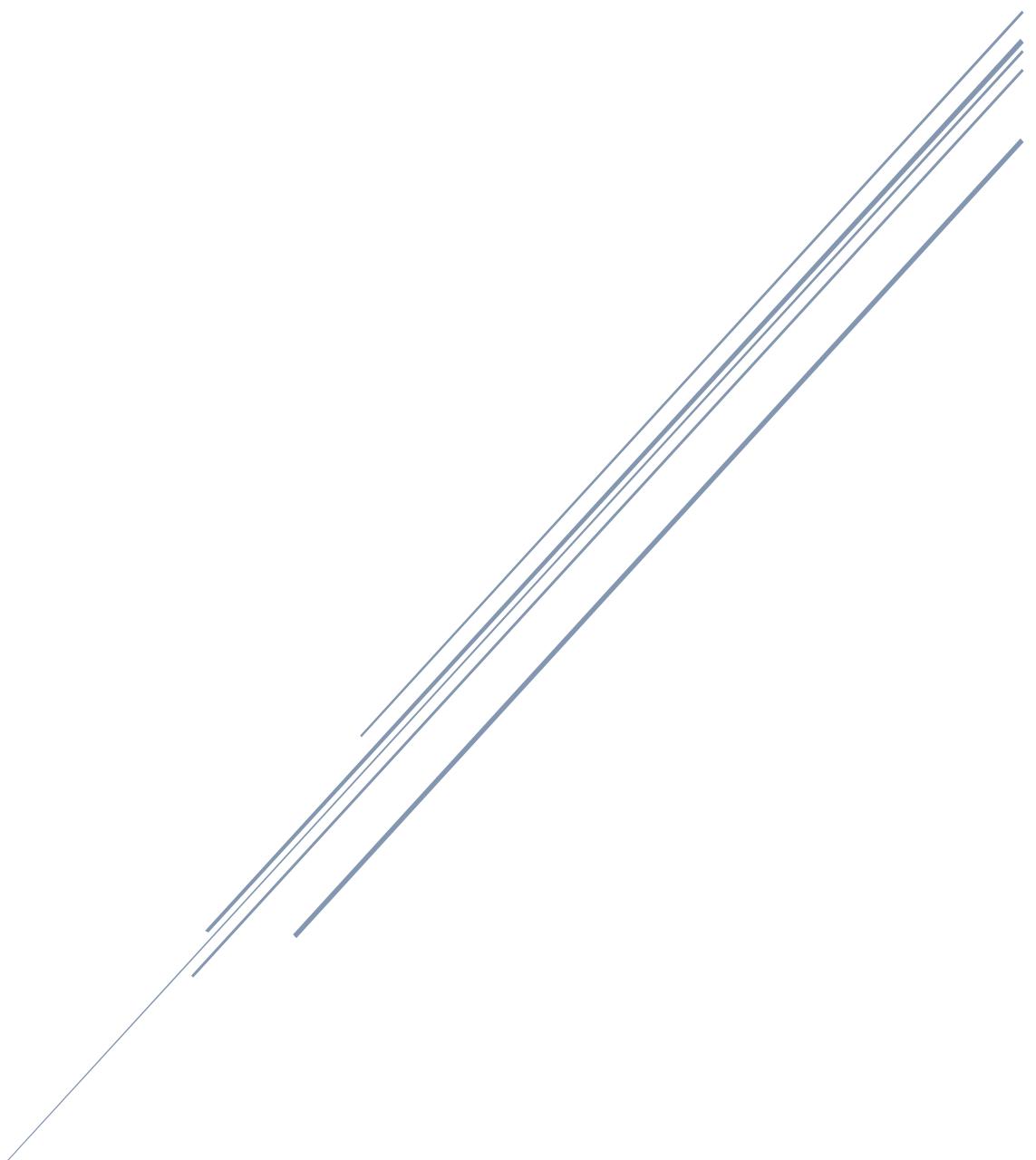
Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu untuk penyelesaian laporan ini, Semoga Tuhan Memberkati .



Lampiran

LAMPIRAN I

LAKIP 2018



PERENCANAAN STRATEGIK DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2017 - 2022

TABEL RENSTRA BAB IV

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ sasaran Tahun ke -											
			Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Tahun V			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Profesionalisme Pelayanan OPD					-	2.709.114.240							
	1.1	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan APBD												
	1.1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	6.630.749.828	100%	6.829.672.323	100%	7.034.562.492	100%	7.245.599.367	100%	7.462.967.348		
	1.1.1	Tersedianya layanan jasa pos sesuai rencana kebutuhannya	12 Laporan	24.000.000	12 Laporan	26.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	33.599.367	12 Laporan	35.000.000		
	1.1.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik selama 1 tahun	1 Paket	1.000.000.000	1 Paket	1.100.000.000	1 Paket	1.150.000.000	1 Paket	1.160.000.000	1 Paket	1.190.000.000		
	1.1.3	Tersedianya Jasa perlengkapan dan perlengkapan kantor sesuai rencana kebutuhannya	12 laporan	45.000.000	12 laporan	55.000.000	12 laporan	57.000.000	12 laporan	65.000.000	12 laporan	70.000.000		
	1.1.4	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 laporan	1.700.000.000	12 laporan	1.620.000.000	12 laporan	1.625.000.000	12 laporan	1.700.000.000	12 laporan	1.750.000.000		
	1.1.5	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 laporan	290.000.000	12 laporan	250.000.000	12 laporan	275.000.000	12 laporan	350.000.000	12 laporan	355.000.000		
	1.1.6	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 laporan	200.000.000	12 laporan	220.000.000	12 laporan	250.000.000	12 laporan	250.000.000	12 laporan	257.000.000		
	1.1.7	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	12 laporan	200.000.000	12 laporan	220.000.000	12 laporan	250.000.000	12 laporan	250.000.000	12 laporan	257.000.000		
	1.1.8	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	53.149.828	1 Paket	50.000.000	1 Paket	52.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	63.967.348		
	1.1.9	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	450.000.000		
	1.1.10	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan penunjang lainnya	12 Laporan	183.600.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	230.000.000	12 Laporan	245.000.000	12 Laporan	250.000.000		
	1.1.11	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Laporan	2.000.000.000	12 Laporan	2.100.000.000	12 Laporan	2.110.000.000	12 Laporan	2.115.000.000	12 Laporan	2.200.000.000		
	1.1.12	Tersedianya struktur Dinkes sesuai kebutuhan daerah	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	351.000.000	12 Laporan	352.000.000	12 Laporan	350.000.000		
	1.1.13	Tersedianya jasa pengelola Web Site	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.672.323	12 Laporan	95.000.000	12 Laporan	110.000.000	12 Laporan	160.000.000		
	1.1.14	Tersedianya Jasa pengelola data Informasi Kesehatan	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	48.000.000	12 Laporan	59.562.492	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	75.000.000		
	1.2	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur.	2	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	12 100%	2.553.600.000	12 100%	2.630.208.000	12 100%	2.709.114.240	12 100%	2.790.387.667	12 100%	2.874.099.297
	2.1	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	200.000.000	1 Paket	220.000.000	1 Paket	230.000.000	1 Paket	235.000.000	1 Paket	240.000.000		
	2.2	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	849.400.000	1 Paket	849.400.000	1 Paket	890.000.000	1 Paket	900.000.000	1 Paket	975.099.297		
	2.3	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	1 Paket	500.000.000	1 Paket	620.000.000	1 Paket	620.000.000	1 Paket	672.000.000	1 Paket	673.000.000		
	2.4	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	260.000.000	1 Paket	261.000.000		
	2.5	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Paket	172.000.000	1 Paket	72.000.000	1 Paket	72.000.000	1 Paket	73.000.000	1 Paket	74.000.000		
	2.6	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket			
	2.7	Terlaksananya Pembangunan/Penataan Halaman Gudang Perbekalan Kesehatan	1 Paket	582.200.000	1 Paket	618.808.000	1 Paket	647.114.240	1 Paket	650.387.667	1 Paket	651.000.000		
	1.3	Meningkatkan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur	100%	500.000.000	100%	515.000.000	100%	530.450.000	100%	546.363.500	100%	562.754.405

			3.1	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	1 Paket	170.000.000	1 Paket	175.000.000	1 Paket	180.000.000	1 Paket	185.913.500	1 Paket	190.390.905
			3.2	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	1 Paket	160.000.000	1 Paket	165.000.000	1 Paket	170.450.000	1 Paket	176.450.000	1 Paket	184.450.000
			3.3	Tersedianya Pakaian Khusus har-hari tertentu	1 Paket	170.000.000	1 Paket	175.000.000	1 Paket	180.000.000	1 Paket	184.000.000	1 Paket	187.913.500
			4	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	500.000.000	100%	515.000.000	100%	530.450.000	100%	546.363.500	100%	562.754.405
			4.1	Jumlah Pegawai yg kompeten sesuai materi Pendidikan dan pelatihan formalnya	4 Orang									
			4.2	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 Laporan									
			4.3	Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 Laporan									
			4.4	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah di bidang Kesehatan	1 Laporan									
	1.4	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja SKPD	100%	4.064.412.960	100%	4.186.345.349	100%	4.311.935.709	100%	4.441.293.781	100%	4.574.532.594
			5.1	Paket laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD sesuai ketentuan yang berlaku	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	65.000.000
			5.2	Dokumen Renja dan LKPD yang tepat syarat dan Waktu	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	70.000.000
			5.3	Dokumen RKA dan DPA yang tepat syarat dan Waktu	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	45.000.000
			5.4	Laporan keuangan semesteran dan pelaporan prognosis realisasi anggaran yang tepat syarat dan Waktu	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	50.000.000
			5.5	Laporan keuangan OPD akhir Tahun yang tepat Syarat dan waktu	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	65.000.000
			5.6	Laporan SKP PNS dan Laporan Administrasi dan Profil Kepegawaian Lingkup OPD	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	50.000.000
			6.1	Terkumpul dan Termutakhirnya Data dan Tersusunnya Data Dasar Puskesmas Kab/Kota Se Papua Barat	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	355.000.000	1 Laporan	360.000.000
			6.2	Terkumpul dan Termutakhirnya Data Profil Kesehatan Provinsi	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	535.000.000	1 Laporan	550.000.000
			6.3	Terlaksananya koordinasi teknis Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	355.000.000	1 Laporan	355.000.000
			6.4	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	450.000.000
			6.6	Terlaksanya Rapat Kerja Kesehatan Daerah	1 Laporan	2.000.000.000	1 Laporan	2.121.932.389	1 Laporan	2.247.522.749	1 Laporan	2.251.293.781	1 Laporan	2.261.532.594
			6.7	Terlaksananya Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Papua Barat	1 Laporan	239.412.960	1 Laporan	239.412.960	1 Laporan	239.412.960	1 Laporan	240.000.000	1 Laporan	253.000.000
2	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	2.1	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	100%	14.284.586.809	100%	17.141.504.171	100%	20.569.805.005	100%	24.683.766.006	100%	29.620.519.208
		26.1	Ketersediaan Obat dan Vaksin	1 Paket	10.436.000.000	1 Paket	12.191.504.171	1 Paket	15.109.805.005	1 Paket	17.513.766.006	1 Paket	20.100.519.208	
		26.2	Pendistribusian obat dan perlекean kesehatan yang terlaksana sesuai dengan permintaan/ kebutuhan dan atau alokasi pengelola program	1 Paket	3.423.586.809	1 Paket	4.500.000.000	1 Paket	5.000.000.000	1 Paket	6.700.000.000	1 Paket	9.040.000.000	
		26.3	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas pengelola obat	29 Orang	265.000.000	29,2 Orang	275.000.000	29 Orang	280.000.000	29 Orang	285.000.000	29 Orang	290.000.000	
		26.4	Terlaksananya Evaluasi Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Dasar dan Program	1 Laporan	160.000.000	1 Laporan	175.000.000	1 Laporan	180.000.000	1 Laporan	185.000.000	1 Laporan	190.000.000	
			Persentase Kabupaten/Kota yang minimal 25% fasilitas pelayanan kesehatan dasarnya dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar berkualitas	25%	8.150.226.260	31%	10.595.294.138	46%	13.773.882.379	62%	17.906.047.093	77%	23.277.861.221	

				19.1	Jumlah paket pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang dilaksanakan	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket
				19.2	Jumlah perawat yang mengikuti pelatihan	29,2 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang
				19.3	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti workshop Keselamatan Pasien	29,2 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang
				19.4	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti workshop Internal dan Tinjauan Manajemen	29,2 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang
				Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan			100%		100%		100%		100%	
				10.1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan
				10.2	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang dihasilkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan
					Jumlah paket kegiatan kampanye	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan
				10.3	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	29 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang
				10.4	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	29 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang
				10.5	Percentase Kabupaten/Kota yang melakukan surveilans	13 Kab/Kota		13 Kab/Kota		29 Kab/Kota		29 Kab/Kota		29 Kab/Kota
				10.6	Percentase Kabupaten/Kota yang melakukan pelacakan	13 Kab/Kota		13 Kab/Kota		29 Kab/Kota		29 Kab/Kota		29 Kab/Kota
				10.7	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	29 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang
				10.8	Jumlah bangunan dan fasilitas TFC yang dapat disediakan	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket
				10.9	Jumlah paket logistik penunjang program gizi yang dapat disediakan	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket
				Percentase Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Kartu Indonesia Sehat (KIS)			70%		80%		90%		100%	
				18.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan
				18.2	Tersedia 1 laporan jumlah kepesertaan JKN	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan
				18.3	Tersedia 1 laporan jumlah kepesertaan JKN	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan
				18.4	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang
				18.5	Tersedia 13 laporan bimtek dan monev	13 Laporan		13 Laporan		13 Laporan		13 Laporan		13 Laporan
				18.6	Tersedia 1 laporan pelaksanaan JKN	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan
				Percentase Kemitraan Kesehatan Terhadap Lembaga Agama, Adat dan Lembaga Kemasyarakatan			25%		30%		35%		40%	
				16.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1								
				Jumlah Kabupaten/ Kota Sehat			13		13		13		13	
				14.1	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat	29								
				14.2	Tersedianya sarana air minum dan sanitasi dasar oleh masyarakat hasil dari pemberdayaan	29								
				14.3	Tersedianya stakeholder dan lintas sektor yang berwawasan pasar tradisional sehat	1								
				14.4	Meningkatnya tenaga kesehatan lingkungan yang terlatih	29								

				14.5	Meningkatnya persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	1															
				14.6	Meningkatnya persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	1															
				14.7	Meningkatnya jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM	29															
				Persentase Kabupaten/ Kota Yang Melaksanakan Hidup Sehat			100%			100%			100%			100%			100%		
				13.1	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan untuk pelatihan	29	Orang		29,2	Orang			29	Orang		29	Orang		29	Orang	
				13.2	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		
				Menurunkan Angka Kematian Bayi menjadi < 10 per Kelahiran Hidup			< 10			< 10			< 10			< 10			< 10		
				8.1	Terlaksananya Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	29	Orang		29,2	Orang		29	Orang		29	Orang		29	Orang		
				8.2	Pelaitihan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Neonatal	29	Orang		29,2	Orang		29	Orang		29	Orang		29	Orang		
				8.3	Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam SDIDTK	29	Orang		29,2	Orang		29	Orang		29	Orang		29	Orang		
				8.4	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan	29	Orang		29,2	Orang		29	Orang		29	Orang		29	Orang		
				8.5	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan	29	Orang		29,2	Orang		29	Orang		29	Orang		29	Orang		
				8.6	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan	29	Orang		29,2	Orang		29	Orang		29	Orang		29	Orang		
				8.7	Jumlah Dokter Umum Yang Mengikuti Pelatihan	29	Orang		29,2	Orang		29	Orang		29	Orang		29	Orang		
				8.8	Jumlah Dokter Umum Yang Mengikuti Pelatihan	29	Orang		29,2	Orang		29	Orang		29	Orang		29	Orang		
				8.9	Jumlah Guru PAUD Yang Mengikuti Pelatihan	29	Orang		29,2	Orang		29	Orang		29	Orang		29	Orang		
				8.10	Jumlah Dokumen Kesepakatan yang dihasilkan	1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		
				8.11	Jumlah Paket Fasilitas Pelayanan yang dapat disediakan	1	Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket		
				Persentase Kab/Kota yang Memiliki Profil Kesehatan Setiap Tahunnya			31%			46%			62%			77%			100%		
				6.2	Terkumpul dan Termutakhirnya Data Profil Kesehatan Provinsi	1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		
				Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Yang Terdampak Krisis Kesehatan			100%			100%			100%			100%			100%		
				39.1	Terbentuknya Tim reaksi cepat/ RHA dan Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1															
				39.2	Peningkatan kapasitas petugas Team Gerak Cepat(TGC)	26															
				39.3	Terbentuknya Pengelolaan Data dan Informasi PKK	1															
				Menurunkan Angka Kematian Ibu (OAP) menjadi < 50 Kelahiran Hidup			< 50			< 50			< 50			< 50			< 50		
				9.1	Jumlah Dokumen Kesepakatan yang dihasilkan	1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		
				9.2	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan	29	Orang		29,2	Orang		29	Orang		29	Orang		29	Orang		
				9.3	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan	45	Orang		45	Orang		45	Orang		45	Orang		45	Orang		
				9.4	Jumlah Bidan Koordinator yang mengikuti orientasi	29	Orang		29,2	Orang		29	Orang		29	Orang		29	Orang		
				9.5	Jumlah Paket Fasilitas Pelayanan yang dapat disediakan	1	Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket		

				Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak di Usia Pendidikan Dasar Kabupaten/kota	100%			100%			100%			100%			100%	
			10.1	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	29 Orang			29,2 Orang			29 Orang			29 Orang			29 Orang	
			10.2	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	29 Orang			29,2 Orang			29 Orang			29 Orang			29 Orang	
			10.3	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	29 Orang			29,2 Orang			29 Orang			29 Orang			29 Orang	
			10.4	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	29 Orang			29,2 Orang			29 Orang			29 Orang			29 Orang	
			10.5	Jumlah Dokumen Kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan	
			10.6	Jumlah Dokumen Kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan	
			10.7	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan	
			10.8	Jumlah paket penunjang berupa UKS Kit yang dapat disediakan	1 Paket			1 Paket			1 Paket			1 Paket			1 Paket	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Produktif di Kabupaten/kota	100%			100%			100%			100%			100%	
			11.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Lanjut Kabupaten/kota	100%			100%			100%			100%			100%	
			12.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan	
			12.2	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	29 Orang			29,2 Orang			29 Orang			29 Orang			29 Orang	
			12.3	Jumlah Lansia Kit yang dapat disediakan	1 Paket			1 Paket			1 Paket			1 Paket			1 Paket	
				Persentase Kab/kota yang melaksanakan Keluarga Sehat	25%			30%			35%			40%			50%	
			13.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1													
			13.2	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	29													
			13.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan yang dapat disediakan	1													
				Persentase Pelayanan Kesehatan Yang dilaksanakan di lingkungan kantor Gubernur Papua Barat	100%			100%			100%			100%			100%	
			14.1	Jumlah paket pelayanan kesehatan yang dilaksanakan	1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan	
			14.2	Jumlah paket logistik pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan	1 Paket			1 Paket			1 Paket			1 Paket			1 Paket	
			14.3	Jumlah pertemuan sosialisasi yang dilakukan	1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan	
				Cakupan Kab/Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	31%			46%			62%			77%			100%	
			15.1	Tersosialisasinya program kesehatan kerja	1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan	
			15.2	Terlaksananya kegiatan program kesehatan kerja di kab/kota	1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan	
	2.2	Meningkatkan Akses dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Yang Berkualitas dan Merata		Cakupan Puskesmas Terakreditasi di Distrik	10%	38.465.377.230		29%	56.207.810.197		49%	61.973.864.657		68%	67.122.739.950		87%	71.243.335.741
			23.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan	

			23.2	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	26 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang	
			23.3	Tersedia 13 laporan bimtek dan monev	13 Laporan		13 Laporan		13 Laporan		13 Laporan		13 Laporan	
			23.4	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
			Persentase Alat Kesehatan Yang digunakan Sesuai Standar		70%		80%		90%		100%		100%	
			Jumlah Rumah Sakit Rujukan		0	105.555.923.025	0	110.833.719.176	1	116.375.405.135	2	122.194.175.392	3	128.303.884.161
			24.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
			24.2	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
			24.3	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	26 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang	
			Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		0,0192		0,0229		0,0229		0,0244		0,0244	
			25.1	Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit Provinsi Secara Bertahap	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	
			25.2	Terlaksananya Registrasi Rumah Sakit Provinsi	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
			25.3	Tersedianya Alat Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium Rumah Sakit	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	
			Cakupan Sarana dan Prasarana UTD dan BDRS Tingkat Provinsi		70%		80%		90%		100%		100%	
			29.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
			29.2	Jumlah tenaga dokter yang mengikuti pelatihan	29 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang	
			29.3	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	29 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang	
			29.4	Tersedianya Sarana dan Prasarana UTD Tingkat Provinsi	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	
			Persentase Pasien Masyarakat OAP Sakit Berat di Rujuk		100%	20.571.461.156	100%	24.685.753.388	100%	29.622.904.065	100%	35.547.484.878	100%	42.656.981.854
			17.1	Tersedianya Akses Rujukan Kesehatan Bagi Orang Papua	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	
			17.2	Terbiayainya Operasional Program Rujukan bagi Orang Asli Papua	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
			17.3	Peningkatan pemahaman regulasi program	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
			Jumlah Tenaga Kesehatan dan Bidan Desa Yang ditempatkan		29	1.296.000.000	29	1.555.200.000	29	1.866.240.000	29	2.239.488.000	29	2.687.385.600
			31.1	Jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan	29 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang	
			31.2	Jumlah Bidan yang ditempatkan	29 Orang		29,2 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang	
			31.3	Tersedia 13 laporan monev keberadaan Tenaga Kesehatan	13 Laporan		13 Laporan		13 Laporan		13 Laporan		13 Laporan	
			Rasio Tenaga Kesehatan, Dokter, Tenaga Medis per satuan penduduk		TK : 1,05; D : 0,52; TM : 0,53		TK : 1,32; D : 0,65; TM : 0,67		TK : 1,57; D : 0,77; TM : 0,80		TK : 1,81; D : 0,89; TM : 0,92		TK : 2; D : 1; TM : 1	
			30.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
			30.2	Tersedia 13 laporan monev Data SDMK	13 Laporan		13 Laporan		13 Laporan		13 Laporan		13 Laporan	
			Pencapaian Uci desa		64,74	1.650.000.000	73,83%	1.815.000.000	82,73%	1.996.500.000	91,43%	2.196.150.000	100,00%	2.415.765.000
			35.1	Jumlah dinas kesehatan yang menyajikan dan mengevaluasi hasil kegiatan imunisasi	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
			35.2	Jumlah kab/kota yang menyajikan dan mengevaluasi hasil kegiatan KIPI	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	

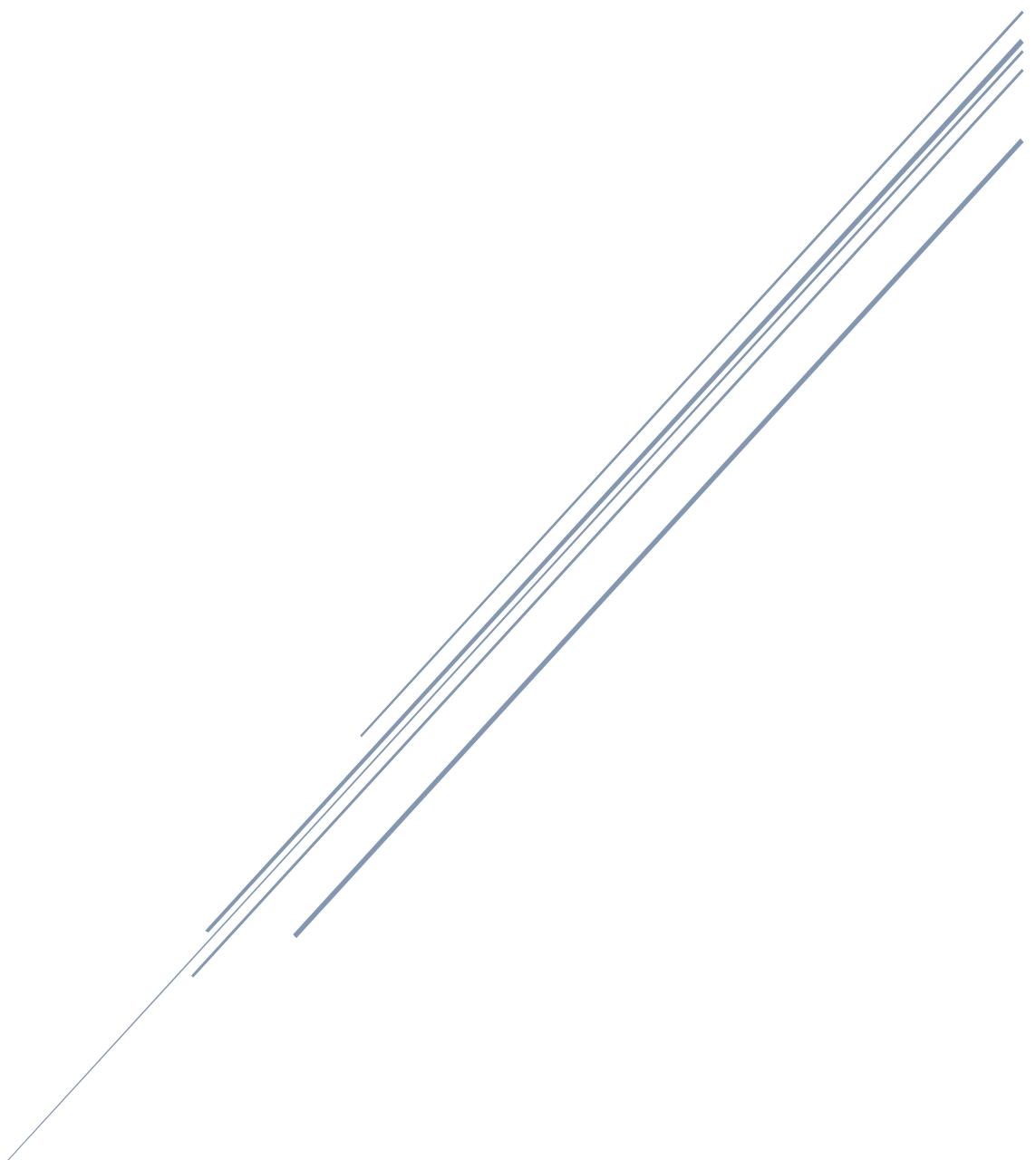
			35.3	Ditemukan adanya kasus AFP	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
			35.4	Meningkatnya pengetahuan tentang penanggulangan KLB PD3I dan PIE	26 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang	
			45	Percentase Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan Pandu PTM	85%	836.000.000	90%	919.600.000	94%	1.011.560.000	98%	1.112.716.000	100%	1.223.987.600
			45.1	Terdapat jumlah petugas yang terlatih untuk Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim	24 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang	
			45.2	Terdapat jumlah petugas yang terlatih dalam penanggulangan penyakit tidak menular	15 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang	
			45.3	Terbentuknya Posbindu di semua Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
			45.4	Terlaksananya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Kabupaten/kota	100%			100%		100%		100%		100%
			40.1	Adanya keperdulian petugas dalam pengelolaan program penderita hipertensi di kab/kota	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita DM di Kabupaten/kota	100%		100%		100%		100%		100%	
			41.1	Adanya keperdulian petugas dalam pengelolaan program penderita DM di kab/kota	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
				Angka kematian calon jemaah haji < 2 per 1.000 calon jemaah haji pada setiap tahun penyelenggaraan haji sampai tahun 1443H / 2022M	< 2	385.000.000	< 2	423.500.000	< 2	465.850.000	< 2	512.435.000	< 2	563.678.500
			22.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan										
			22.2	Jumlah tenaga Tim Pemeriksa Kesehatan Haji yang mengikuti pelatihan										
			22.3	Jumlah paket logistik pelayanan kesehatan haji yang tersedia di Kabupaten/Kota										
			22.4	Terpantauanya kondisi kesehatan calon jemaah haji										
				Jumlah Tanaman Obat Asli Papua Yang terdata	20	220.000.000	40	242.000.000	60	266.200.000	80	292.820.000	100	322.102.000
			27.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten/kota	100%	330.000.088	100%	363.000.097	100%	399.300.106	100%	439.230.117	100%	483.153.129
			42.1	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	26 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang	
			42.2	Jumlah dokumen konsultasi teknis ke Pusat yang dihasilkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
			42.3	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
				Persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 1 fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan dan	3	495.000.000	5	544.500.000	8	598.950.000	11	658.845.000	13	724.729.500
			49.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
			49.2	Terlatihnya petugas kesehatan indera pada FKTP	26 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang		26 Orang	
				Menurunnya prevalensi HIV pada penduduk usia 15-49 menjadi <1,5% pada tahun 2022	1,90%	7.800.522.939	1,80%	8.580.575.233	1,70%	9.438.632.756	1,60%	10.382.496.032	1,50%	11.420.745.635
			34.1	Terlatihnya tenaga kesehatan di Provinsi Papua Barat	26 Orang		30 Orang		32 Orang		34 Orang		36 Orang	

				34.2	Ditemukan dan dilayani seluruh penderita HIV Khususnya (OAP) sesuai standar	2.00	%		1.90	%		1.80	%		1.70	%		1.60	%	
				48.1	Cakupan Penanggulangan Diare	100%			100%			100%			100%			100%		
				48.2	Terdapatnya kesepakatan dalam melaksanakan rencana tindak lanjut.	1														
				48.3	Peningkatan Kapasitas Sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB Diare, Hepatitis, ISP	23														
					Tertanggulanginya KLB Diare, Hepatitis, ISP															
					Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Frambusia	100%			100%			100%			100%			100%		
				47.1	Terdapatnya petugas frambusian yang terlatih															
				47.2	Meningkatnya Jumlah kasus baru frambusia yang di temukan															
					Cakupan Pelayanan Kesehatan ISPA Kabupaten/kota	100%			100%			100%			100%			100%		
				46.1	Adanya keperluan petugas dalam pengelolaan program ISPA di kab/kota	23														
					Jumlah kabupaten dengan eliminasi kusta	3			5			8			11			13		
				43.1	Mensosialisasikan Kusta pada masyarakat	1														
				43.2	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	26														
					Persentase Jumlah Orang Yang Minum Obat Filariasis	85%			90%			95%			97%			100%		
				44.1	Terlaksananya kegiatan untuk meningkatkan kapasitas Petugas															
				44.2	Terlaksananya gerakan Bulan Eliminasi kaki Gajah															
					Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Malaria	65.04%			88.78%			90.50%			95.49%			100%		
				36.1	Terdapatnya tenaga Entomologi yang terlatih di puskesmas	26														
				36.2	Meningkatnya Jumlah dokter ,Perawat,Bidan yang terlatih	26														
				36.3	Meningkatnya Jumlah dokter, Perawat, Bidan yang terlatih	26														
				36.4	Meningkatnya Jumlah Crosschecker malaria yang terlatih	26														
				36.5	Meningkatnya Jumlah mikroskopist yang dilatih	26														
				36.6	Tersedianya tenaga surveilans malaria yang terlatih	26														
					Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%			100%			100%			100%			100%		
				37.1	Terbentuknya Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan penanggulangan KLB	1														
				37.2	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan															
					Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	87.94%			90.51%			92.96%			95.41%			100%		
				38.1	Meningkatnya kemampuan Tim DOTS RS	26														
				38.2	Meningkatnya kemampuan Tim Manajemen TB Tingkat Provinsi	26														
				38.3	Meningkatnya kualitas di fasilitas pelayanan kesehatan	13														
					Persentase tenaga kesehatan yang ter registrasi	70%	18.736.275.800	0	80%	20.609.903.380	90%	22.670.893.718	100%	24.937.983.090	100%		27.431.781.399			
				33.1	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan		
				33.2	Jumlah tenaga kesehatan yang ter registrasi	1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan			1 Laporan		
					Cakupan tenaga kesehatan yang meningkat kapasitas dalam perencanaan pembangunan kesehatan	100%			100%			100%			100%			100%		
				30.3	Jumlah tenaga kesehatan yang dihasilkan	29 Orang			29,2 Orang			29 Orang			29 Orang			29 Orang		
					Cakupan tenaga kesehatan yang meningkat kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan	100%			100%			100%			100%			100%		

			32.1	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis fungsional dan manajemen	50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang	
			32.2	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan berkelanjutan	100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang	
			33.3	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti peningkatan kapasitas	10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang	
				Cakupan tenaga kesehatan yang meningkatkan kapasitas dalam pelayanan rujukan	100%		100%		100%		100%		100%	
			33.4	Jumlah Dokter Spesialis (OAP) yang mengikuti pendidikan	0 Orang		6 Orang		6 Orang		6 Orang		36 Orang	
			33.5	Jumlah Orang Asli Papua yang mengikuti Pendidikan Apoteker di Fasyankes	65 %		70 %		75 %		80 %		85 %	
			2.8	Terlaksananya Pembangunan Gedung BAPELKES	1 Paket	8.000.000.000	1 Paket	10.000.000.000	1 Paket	12.000.000.000	1 Paket	14.000.000.000	1 Paket	16.000.000.000

LAMPIRAN II

LAKIP 2018



	Bimbingan Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	52	800.000.000,00	0	0	13 kabupaten/kota	185.438.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dinas Kesehatan	
	Pengadaan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM)	Tersedianya Posbindu Kit untuk Penyakit Tidak Menular (PTM)	80	800.000.000,00	0	0	10 Kit	83.421.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	73.405.000,00	10	73.405.000,00	10,00	73.405.000,00	12,50	9,18	Dinas Kesehatan			
	Sosialisasi dan Advokasi Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Terlaksanya Sosialisasi dan Advokasi Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	320	1.000.000.000,00	0	0	80 Orang	233.865.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80	233.865.000,00	80	233.865.000,00	80,00	233.865.000,00	25,00	23,39	Dinas Kesehatan			
	Surveillance Penyakit Tidak Menular	Terlaksana Surveillance Penyakit Tidak Menular	152	1.000.000.000,00	0	0	38 Orang	252.686.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38	225.974.774,00	38	225.974.774,00	38,00	225.974.774,00	25,00	22,60	Dinas Kesehatan			
			Rata-rata Capaian Kinerja (%)		105.932.028.000,04			0,00		844.516.385,00		17.760.509.700,00		73.516.086.210,00		92.121.112.306,00										
			Predikat Kinerja																							

Faktor Pendongr Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut Yang diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya *):

Tindak Lanjut Yang diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Provinsi Berikutnya*) :

* Dilis Oleh Kepala BAPPEDA

Disusun
Manokwari, 29 Januari 2019

Disetujui
Manokwari,

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

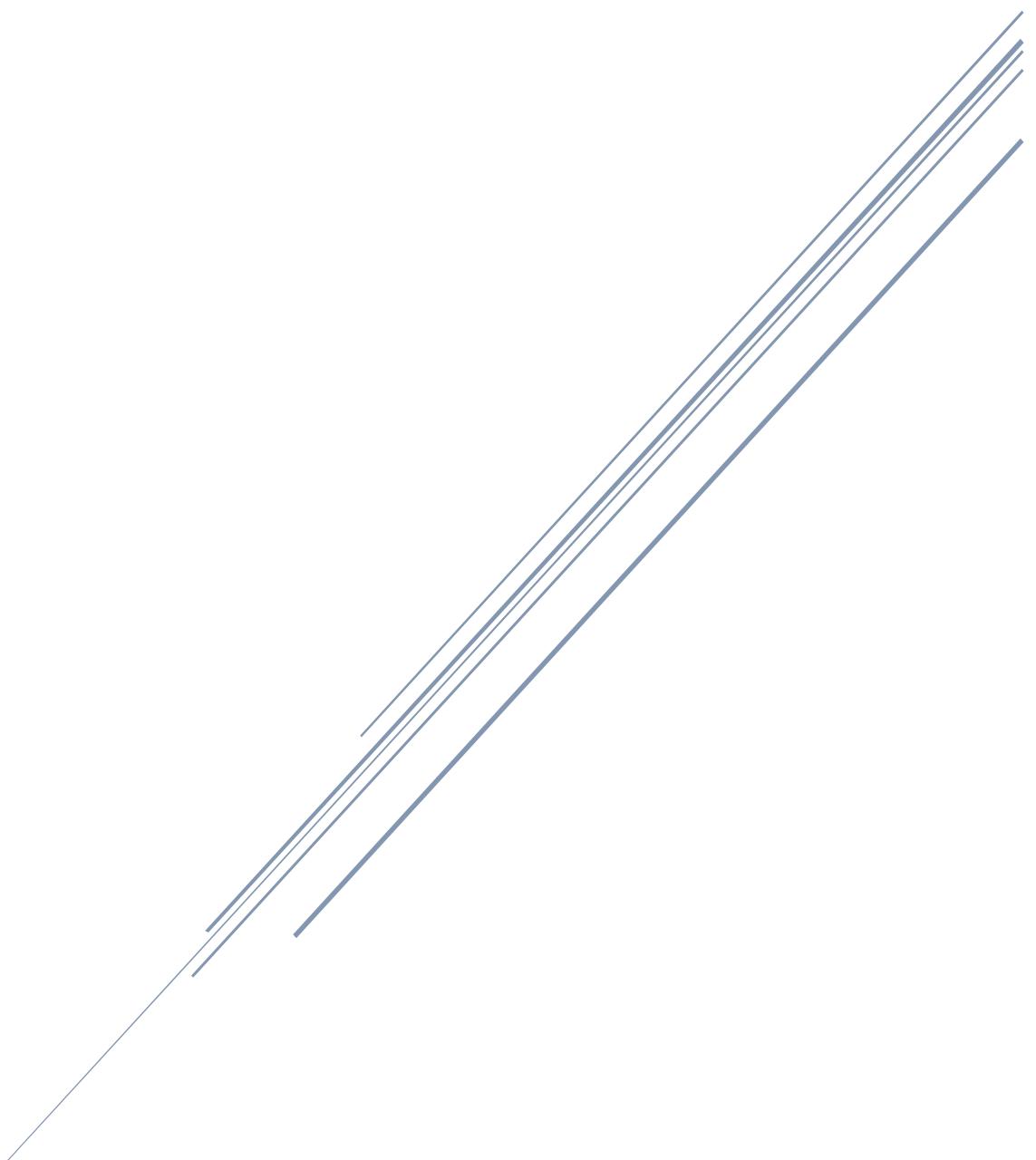
OTTO PARORONGAN, SKM, M.Kes
NIP. 19671004 199312 1 003

KEPALA BAPPEDA
PROVINSI PAPUA BARAT

DANCE SANGKEK, SH, MM
NIP. 196412141992031010

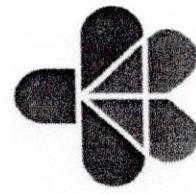
LAMPIRAN III

LAKIP 2018





**DINAS KESEHATAN
PROVINSI PAPUA BARAT**



**SASARAN SKPD &
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2018**

Kompleks Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat
Jln. Brigjen (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari - Papua Barat

PERUMUSAN SASARAN KEGIATAN SKPD DINAS KESEHATAN PAPUA BARAT TAHUN 2018

Bidang : Sekretaris		Subbid : Subbag Program, Humas dan Informasi					
	100%	Upaya Kesehatan Masyarakat	174.792.100	Rapat Koordinasi Teknis dan Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi	39.332.500	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Teknis dan Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi	Jumlah Dokumen 1 Dokumen
				Rapat Koordinasi Teknis dan Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/ Kota	135.439.600	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Teknis dan Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen 1 Dokumen
Bidang : Sekretaris		Subbid : Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum					
	100%	Upaya Kesehatan Masyarakat	174.792.100	Penyedian jasa surat menyurat	22.722.000	Tersedianya jasa surat menyurat	100 Persen (%)
				Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.271.380.000	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	12 Bulan
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.046.590.000	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	160.364.000	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	1 Unit
				Penyediaan alat tulis kantor	197.943.000	Tersedianya Alat Tulis Kantor	48 Jenis
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	155.762.500	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	6 Jenis
				Penyediaan komponen instalasi	25.380.000	Tersedianya Komponen Instalasi	5 Komponen
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	530.000.000	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2509 Jenis
				Penyediaan minuman	91.800.000	Tersedianya minuman untuk kegiatan penunjang lainnya	30 Orang
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke kuar daerah	1.421.750.000	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun
				Pemutakhiran Data Program dan Kepegawaian	132.100.600	Tersedianya struktur Dinkes sesuai kebutuhan daerah	13 Kabupaten/ Kota

Bidang : Sekretaris				Subbid : Subbag Hukum, Kepegawaihan dan Umum			
		100% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.857.344.350	Pengadaan peralatan gedung kantor	836.178.650 Tersedianya Perabatan Gedung Kantor	Terperluhinya kebutuhan peralatan kantor	10 Jenis
		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan (%)		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	4.500.000 Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Terperluhnya perlengkapan gedung kantor	1 Jenis
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	911.500.000 Tersedianya jasa dan biaya pemeliharaan	Terperluhnya pemeliharaan kendaraan dinas	82 Unit
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	57.765.700 Tersedianya jasa dan biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Terperluhnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	3 Jenis
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	47.400.000 Tersedianya jasa dan biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Persentase terpeliharaan peralatan gedung kantor	100 Persen (%)
Bidang : Sekretaris				Subbid : Subbag Hukum, Kepegawaihan dan Umum			
		100% Peningkatan Disiplin Aparatur	302.010.000	Pengadaan pakaiian dinas beserta perlengkapannya	202.960.000 Tersedianya Pakaiian Dinas beserta perlengkapannya	Terperluhnya jumlah pakaiian dinas	528 Stell
		Meningkatnya aparatur yang memiliki kedisiplinan guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan (%)		Pengadaan pakaiian khusus hari-hari tertentu	99.050.000 Tersedianya Pakaiian khusus hari-hari tertentu	Terperluhnya jumlah pakaiian khusus hari-hari tertentu	283 Stell
Bidang : Sekretaris				Subbid : Subbag Hukum, Kepegawaihan dan Umum			
		100% Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Aparatur	781.608.200	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	488.925.200 Tersediananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Terperluhnya jumlah peserta kegiatan	312 Orang
		Meningkatnya kualitas kapasitas sumber daya aparatur		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	135.000.000 Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah peserta kegiatan	6 Orang
				Penyusunan Peraturan Daerah di bidang Kesehatan	157.983.000 Tersedianya Peraturan Daerah di bidang Kesehatan	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dokumen
Bidang : Sumber Daya Kesehatan				Subbid : Sumber Daya Kesehatan			
		100% Meningkatnya sumber daya aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan (%)		Obat dan Perbekalan Kesehatan	8.038.208.280 Tersedianya buffer stok obat dan bahan habis pakai	Persentase kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	100 Persen (%)
		Meningkatnya kualitas kapasitas sumber daya aparatur		Distribusi Obat dan Vaksin ke kabupaten/ kota	1.300.009.170 Terdistrisibunya Obat dan vaksin ke kabupaten/kota sebesar 100 %	Jumlah Kab/kota yang terdistribusi	13 kab/kota
Menyajikan Informasi Kesehatan				Subbid : Kefarmasian			
		100% Meningkatnya Mutu Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan kesehatan dan Makanan		Pengadaan Buffer Stok Obat dan Bahan Habis Pakai	12.098.272.450 Tersedianya buffer stok obat dan bahan habis pakai	Persentase kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	100 Persen (%)

DAK Farmasi	850.055.000	Terlaksananya DAK Farmasi	Jumlah dokumen DAK Farmasi yang tersusun	1 Dokumen		
Pembangunan/Penataan Halaman Instansi Farmasi	1.910.000.000	Terlaksananya Pembangunan Taman Instansi Farmasi	Jumlah Lahan	1 Lahan		
Bidang : Pelayanan Kesehatan						
Upaya Kesehatan Masyarakat	195.151.400	Penggunaan Program PIS PK	195.151.400	Terselenggaranya Penggunaan Program PIS PK	Jumlah Dokumen	1 Dokumen
Bidang : Kesehatan Masyarakat						
Meningkatnya kesiapan kesehatan masyarakat	100%	Upaya Kesehatan Masyarakat	2.198.301.600	Sosialisasi dan Advokasi PHBS	302.391.600	Terselenggaranya Sosialisasi dan Advokasi PHBS
				Bimtek Pembinaan UKM Sekunder dan Primer	1.037.150.000	Terselenggaranya Bimtek Pembinaan UKM Sekunder dan Primer
Meningkatnya kesiapan kesehatan masyarakat	100%	Upaya Kesehatan Masyarakat	2.198.301.600			
Seksi : Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga						
Kampanye Prilaku Hidup Sehat dan Bersih bagi Pelajar				Kampanye Prilaku Hidup Sehat dan Bersih bagi pelajar	858.760.000	Terselenggaranya Kampanye Prilaku Hidup Sehat dan Bersih bagi pelajar
Bidang : Pelayanan Kesehatan						
Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar	100%	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas/ pembaruan dan jaringannya	13.390.000.000	Pembangunan Puskesmas Tahap II Kab. Maybrat	7.725.000.000	Tersedianya Puskesmas Tahap II Kab. Maybrat
				Pembangunan Puskesmas Tahap II Kab. Manokwari Selatan	5.665.000.000	Tersedianya Puskesmas Tahap II Kab. Manokwari Selatan
Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar	100%	Rasio Jumlah Penduduk per Fasilitas Kesehatan (Puskesmas/ Rumah Sakit)				
Bidang : Pelayanan Kesehatan						
Terwujudnya peningkatan jumlah fasilitas kesehatan	100%	Pengadaan, sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	44.610.000.000	Pengadaan Tambahan Lahan RSUD Provinsi	1.538.000.000	Tersedianya Lahan RSUD Provinsi
				Pembangunan RSUD Provinsi	41.072.000.000	Tersedianya RSUD Rujukan Provinsi
Terwujudnya peningkatan jumlah fasilitas kesehatan	100%	Rasio Jumlah penduduk per fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru/ RS mata)		Pelayanan Pengembalian Darah untuk OAP	2.000.000.000	Tersedianya Pelayanan Pengembalian Darah untuk OAP
Bidang : Pelayanan Kesehatan Rujukan						
Terwujudnya peningkatan kesehatan bagi orang Papua	100%	Rujukan Kesehatan bagi orang Papua	2.050.462.100	Rujukan Kesehatan bagi orang Papua	2.000.000.000	Jumlah orang Papua yang memerlukan Kesehatan
				Sosialisasi Rujukan Kesehatan bagi orang Papua tingkat Provinsi	50.463.100	30 Orang orang Papua yang dilayani
Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan bagi orang Papua	100%					Jumlah laporan sosialisasi rujukan kesehatan bagi orang Papua tingkat Provinsi
						1 Laporan orang Papua

FORMAT PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON II (KEPALA DINAS)



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KESEHATAN

Jalan Brigjend (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai Manokwari – Papua Barat



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Otto Parorrongan, SKM., M.MKes.

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Domingus Mandacan

Jabatan : Gubernur Papua Barat

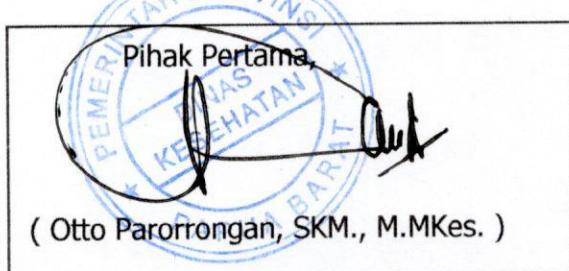
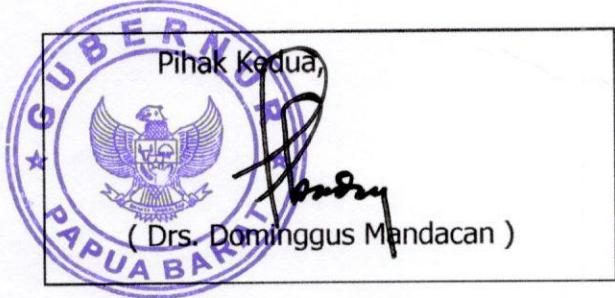
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 4 April 2018



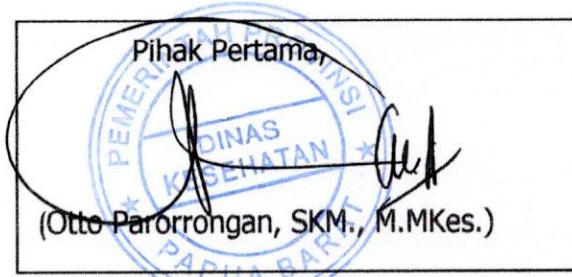
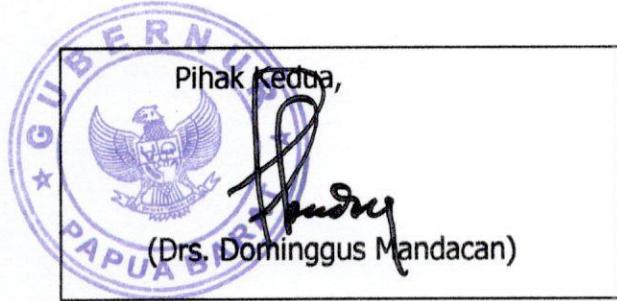
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN : 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran Dinas Kesehatan	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran Dinas Kesehatan	Persen (%)	100%
2	Terjangkaunya pelayanan kesehatan oleh seluruh masyarakat	Persentase Angka Harapan Hidup	Persen (%)	100%
3	Terwujudnya perilaku sadar sehat	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	Persen (%)	100%

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.029.472.700
2	Peningkatan Koordinasi Teknis Profil Kesehatan	174.792.100
3	Pelayanan Administrasi	6.056.092.100
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.857.344.350
5	Peningkatan Displin Aparatur	302.010.000
6	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	781.608.200
7	Obat dan Perbekalan Kesehatan	12.098.272.450
8	Upaya Kesehatan Masyarakat	2.393.453.000
9	Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	13.390.000.000
10	Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	44.610.000.000
10	Rujukan Kesehatan bagi Orang Papua	2.050.463.100

Manokwari, 4 April 2018



FORMAT PERJANJIAN KINERJA (PK) UNIT KERJA ESELON III



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KESEHATAN

Jalan Brigjend (Purn) Marinir Abraham O. Atururi, Arfai Manokwari - Papua Barat



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PADA SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : dr. Arnoldus Tiniap, M.Epid

Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Otto Parorongan, SKM., M.MKes.

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 4 April 2018

Pihak Kedua,

(Otto Parorongan, SKM., M.MKes.)

Pihak Pertama,

(dr. Arnoldus Tiniap, M.Epid)

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

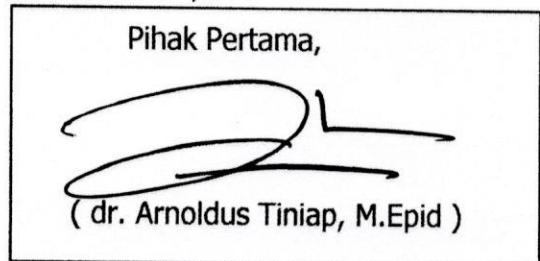
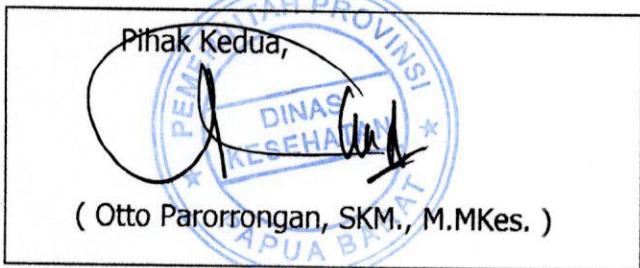
SKPD : DINAS KESEHATAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT
TAHUN ANGGARAN : 2018

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya kinerja administrasi perkantoran yang baik guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	%	100 %
2	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	%	100%
3	Meningkatkan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	Meningkatnya aparatur yang memiliki kedisiplinan guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	%	100%
4	Meningkatnya kualitas kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya sumber daya aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	%	100 %
5	Terwujudnya pencapaian penatausahaan keuangan dan kinerja program guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	%	100%
6	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Teknis dan Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Teknis dan Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	%	100%
7	Terwujudnya peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas/pustu)	Ratio jumlah penduduk per fasilitas kesehatan (puskesmas/pustu)	%	100%
8	Terwujudnya peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru/ RS mata)	Ratio Jumlah penduduk per fasilitas kesehatan	%	100%

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.056.092.100
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.857.344.350
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	302.010.000
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	781.608.200
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.029.472.700
6	Peningkatan Koordinasi Teknis Profil Kesehatan	174.792.100

- | | | |
|---|---|----------------|
| 7 | Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya | 13.390.000.000 |
| 8 | Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata | 44.610.000.000 |

Manokwari, 4 April 2018



FORMAT PERJANJIAN KINERJA (PK) UNIT KERJA ESELON III



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KESEHATAN

Jalan Brigjend (Purn) Marinir Abraham O. Atururi, Arfai Manokwari – Papua Barat



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PADA KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : dr. Fenny Mayana Paisey, M.Si

Jabatan : Kepala Kesehatan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Otto Parorongan, SKM., M.MKes.

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

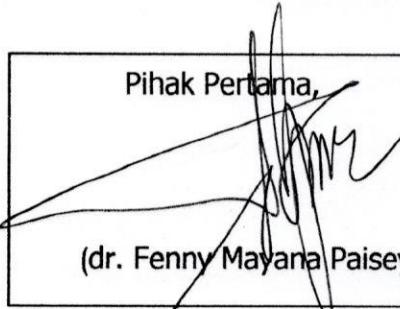
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 4 April 2018

Pihak Kedua,

(Otto Parorongan, SKM., M.MKes.)

Pihak Pertama,

(dr. Fenny Mayana Paisey, M.Si)

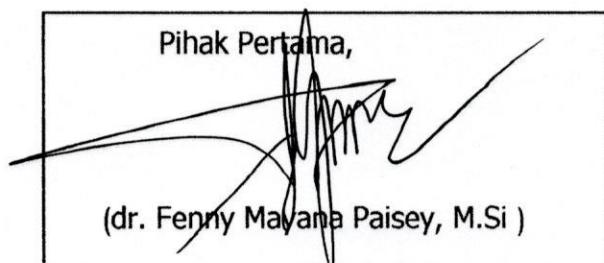
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS KESEHATAN
UNIT KERJA : BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN : 2018

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kesehatan masyarakat	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat	%	100%
2	Terselenggaranya Penguatan Program PIS PK	Terpenuhinya Penguatan Program PIS PK	%	100%

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Upaya Kesehatan Masyarakat	2.198.301.600
2	Upaya Kesehatan Masyarakat	195.151.400

Manokwari, 4 April 2018

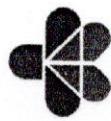


FORMAT PERJANJIAN KINERJA (PK) UNIT KERJA ESELON III



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KESEHATAN

Jalan Brigjend. Marinir Abraham O. Atururi, Arfa Manokwari – Papua Barat



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PADA PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : dr. Victor Eka Nugrahaputra, M.Kes.

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Otto Parorongan, SKM., M.MKes.

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 4 April 2018

Pihak Kedua,

(Otto Parorongan, SKM., M.MKes.)

Pihak Pertama,

(dr. Victor Eka Nugrahaputra, M.Kes)

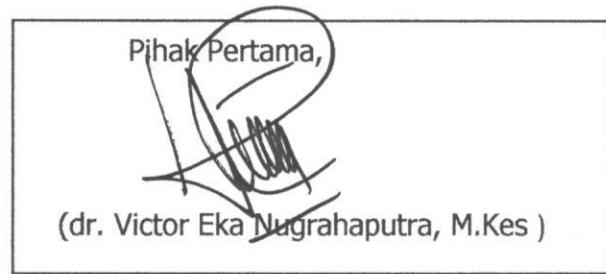
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS KESEHATAN
UNIT KERJA : BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN : 2018

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan bagi orang Papua	Cakupan pelayanan rujukan kesehatan bagi orang Papua Barat yang dilayani	%	100%

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Rujukan Kesehatan bagi orang Papua	2.050.463.100

Manokwari, 4 April 2018



FORMAT PERJANJIAN KINERJA (PK) UNIT KERJA ESELON III



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KESEHATAN

Jalan Brigjend (Purn) Marinir Abraham O. Atururi, Arfai Manokwari – Papua Barat



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PADA SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Petrus Hosyo, S.Sos.

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Otto Parorongan, SKM., M.MKes.

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 4 April 2018

Pihak Kedua,

Ottoman
DINAS KESEHATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

(Otto Parorongan, SKM., M.MKes.)

Pihak Pertama,

Petrus Hosyo

(Petrus Hosyo, S.Sos.)

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

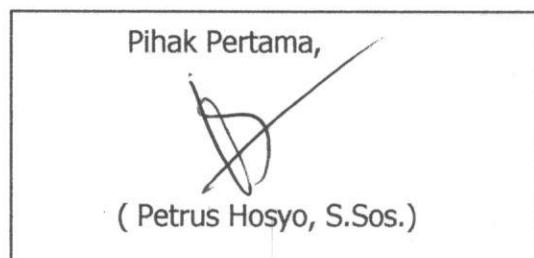
SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: DINAS KESEHATAN
: BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
: 2018

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan Kesehatan dan Makanan	Persentase Mutu Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan Kesehatan dan makanan	%	100%

No Program Anggaran (Rp)
1 Obat dan Perbekalan Kesehatan 12.098.272.450

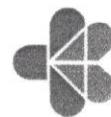
Manokwari, 4 April 2018



FORMAT PERJANJIAN KINERJA (PK) UNIT KERJA ESELON IV



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PADA SUB BAGIAN HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN UMUM DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Silvester Kawuwung, SKM

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Arnoldus Tiniap, M.Epid

Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 4 April 2018

Pihak Kedua,

(dr. Arnoldus Tiniap, M.Epid)

Pihak Pertama,

(Silvester Kawuwung, SKM)

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
UNIT KERJA : Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
TAHUN ANGGARAN : 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersedianya jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	Persen	100 Persen (%)
2	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12 bulan
3	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya pertanggungjawaban dan laporan keuangan yang lengkap	Bulan	12 bulan
4	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	Unit	1 Unit
5	Tersedianya alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Jenis	48 Jenis
6	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Jenis	6 Jenis
7	Tersedianya Komponen Instalasi	Terpenuhinya komponen instalasi	Komponen	5 Komponen
8	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis	2509 Jenis
9	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan penunjang lainnya	Terpenuhinya makanan dan minuman untuk kegiatan penunjang lainnya	Orang	30 Orang
10	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tahun	1 Tahun
11	Tersedianya struktur Dinkes sesuai kebutuhan daerah	Jumlah dokumen hasil pemutakhiran data kepegawaian	Jumlah	13 Kabupaten/ Kota

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.1. Penyediaan jasa surat menyurat	22.722.000
		1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.271.380.000
		1.3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.046.690.000

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

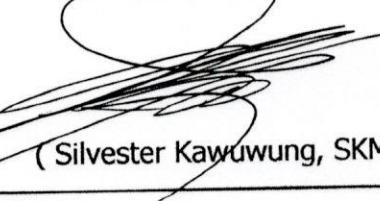
: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
: 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta kegiatan	Jumlah orang	312 Orang
2	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta kegiatan	Jumlah orang	6 Orang
3	Tersusunnya Peraturan Daerah di bidang Kesehatan	Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen	1 Dokumen

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan	488.925.200
		1.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	135.000.000
		1.3. Penyusunan Peraturan Daerah di bidang Kesehatan	157 683.000

Manokwari, 4 April 2018

Pihak Kedua,  (dr. Arnoldus Tiniap, M.Epid)
--

Pihak Pertama,  (Silvester Kawuwung, SKM)

1.4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	160.364.000
1.5. Penyediaan alat tulis kantor	197.543.000
1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	155.762.500
1.7. Penyediaan komponen instalasi	25.980.000
1.8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	530.000.000
1.9. Penyediaan makanan dan minuman	91.800.000
1.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.421.750.000
1.11. Pemutakhiran data program dan kepegawaian	132.100.600

Manokwari, 4 April 2018

Pihak Kedua,

(dr. Arnoldus Tiniap, M.Epid)

Pihak Pertama,

(Silvester Kawuwung, SKM)

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
: 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	Jenis	10 Jenis
2	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	Jenis	1 Jenis
3	Tersedianya jasa dan biaya pemeliharaan	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas	Unit	82 Unit
4	Tersedianya jasa dan biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Jenis	3 Jenis
5	Tersedianya jasa dan biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Persentase terpeliharanya peralatan gedung kantor	Persen	100 %

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan peralatan gedung kantor	836.178.650
		1.2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	4.500.000
		1.3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	911.500.000
		1.4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	57.765.700
		1.5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	47.400.000

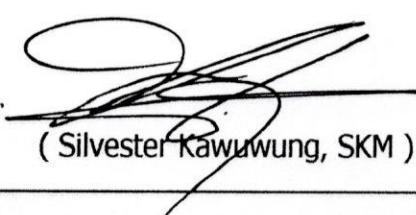
Manokwari, 4 April 2018

Pihak Kedua,



(dr. Arnoldus Tiniap, M.Epid)

Pihak Pertama,



(Silvester Kawuwung, SKM)

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

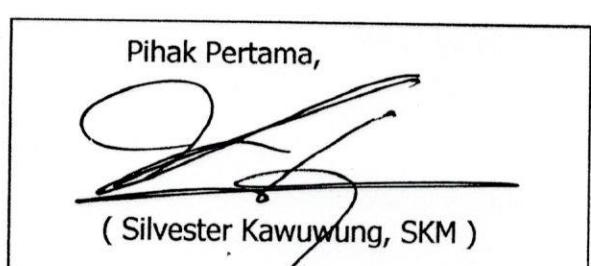
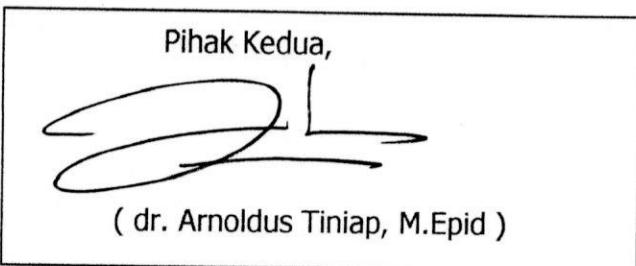
SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
: 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya jumlah kebutuhan pakaian dinas	Jumlah stell	528 Stell
2	Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Terpenuhinya jumlah kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah stell	283 Stell

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Peningkatan disiplin aparatur	1.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	202.960.000
		1.2. Pengadaan pakaian kerja lapangan	99.050.000

Manokwari, 4 April 2018



FORMAT PERJANJIAN KINERJA (PK) UNIT KERJA ESELON IV



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PADA SUB BAGIAN PROGRAM, INFORMASI DAN HUMAS PROVINSI PAPUA BARAT DINAS KESEHATAN



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ida Bagus Windusara, S.Si., Apt.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Humas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Arnoldus Tiniap, M.Epid

Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 4 April 2018

Pihak Kedua,

(dr. Arnoldus Tiniap, M.Epid)

Pihak Pertama,

(Ida Bagus Windusara, S.Si., Apt.)

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
: 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	Dokumen	1 Dokumen
2	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen	Dokumen	1 Dokumen
3	Tersusunnya rencana kerja perangkat daerah	Jumlah Laporan rencana kerja perangkat daerah	Laporan	1 Laporan
4	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen	4 Dokumen
5	Terlaksananya rapat koordinasi teknis Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan tahun 2018	Jumlah kegiatan koordinasi teknis DAK bidang kesehatan 2018	Kegiatan	1 Kegiatan
6	Terlaksananya penyusunan dan sosialisasi SKP ASN	Jumlah dokumen	Dokumen	1 Dokumen
7	Terlaksananya rapat kerja daerah	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan
8	Terlaksananya hari kesehatan nasional	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan
9	Terlaksananya penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA)	Jumlah dokumen rencana kegiatan dan anggaran (RKA) yang disusun	Dokumen	1 Dokumen

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	33.759.000
		1.2. Penyusunan pèlaporan keuangan semesteran	17.655.000
		1.3. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	34.565.000
		1.4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	33.977.000
		1.5. Rapat Koordinasi Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun 2018	167.897.600

1.6. Penyusunan dan Sosialisasi SKP ASN	153.751.600
1.7. Rapat Kerja Kesehatan Daerah	1.075.015.000
1.8. Hari Kesehatan Nasional	468.925.000
1.9. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)	43.927.500

Manokwari, 4 April 2018

Pihak Kedua,



(dr. Arnoldus Tiniap, M.Epid)

Pihak Pertama,



(Ida Bagus Windusara, S.Si., Apt.)

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
UNIT KERJA : Subbagian Program, Informasi dan Humas
TAHUN ANGGARAN : 2018

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	SATUAN (4)	TARGET TAHUNAN (2018) (5)
1.	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Teknis dan Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi	Jumlah Dokumen	Dokumen	1 Dokumen
2	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Teknis dan Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen	Dokumen	1 Dokumen

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Peningkatan Koordinasi Teknis Profil Kesehatan	1.1. Rapat Koordinasi Teknis dan Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi	39.352.500
		1.2. Rapat Koordinasi Teknis dan Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/ Kota	135.439.600

Manokwari, 4 April 2018

Pihak Kedua,

(dr. Arnoldus Tiniap, M.Epid)

Pihak Pertama,

(Ida Bagus Windusara, S.Si., Apt.)

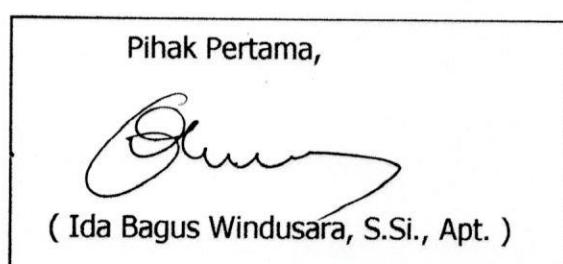
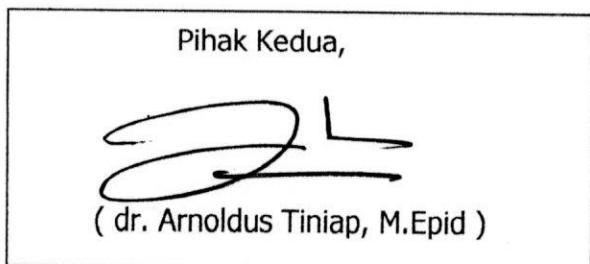
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
UNIT KERJA : Subbagian Program, Informasi dan Humas
TAHUN ANGGARAN : 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terbangunnya Puskesmas Tahap II Kabupaten Maybrat	Tersedianya Bangunan Puskesmas Tahan II Kab. Maybrat	Unit	1 Unit
2	Terbangunnya Puskesmas Tahap II Kabupaten Manokwari Selatan	Tersedianya Bangunan Puskesmas Tahan II Kab. Manokwari Selatan	Unit	1 Unit

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	1.1. Pembangunan Puskesmas Tahap II Kab. Maybrat	7.725.000.000
		1.2. Pembangunan Puskesmas Tahan II Kabupaten Manokwari Selatan	5.665.000.000

Manokwari, 4 April 2018



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Subbagian Program, Informasi dan Humas
: 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersedianya Lahan RSUD Provinsi	Adanya Lahan RSUD Provinsi	Sertifikat	1 Sertifikat
2	Terbangun RSUD Rujukan Provinsi	Terlaksananya Pembangunan RSUD Provinsi	Bangunan	1 Bangunan

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	1.1. Pengadaan Tambahan Lahan RSUD Provinsi	1.538.000.000
		1.2. Pembangunan Rumah Sakit Provinsi	41.072.000.000

Manokwari, 4 April 2018

Pihak Kedua,

(dr. Arnoldus Tiniap, M.Epid)

Pihak Pertama,

(Ida Bagus Windusara, S.Si., Apt.)

FORMAT PERJANJIAN KINERJA (PK) UNIT KERJA ESELON IV



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PADA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmawati, S.Si., Apt.

Jabatan : Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Fenny Mayana Paisey, M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 4 April 2018

Pihak Kedua,

(dr. Fenny Mayana Paisey, M.Si.)

Pihak Pertama,

(Rahmawati, S.Si., Apt.)

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

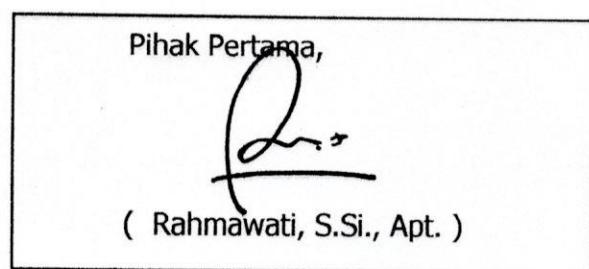
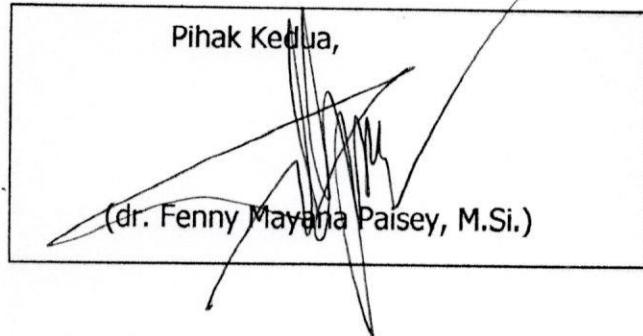
SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga
: 2018

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	KINERJA (3)	SATUAN (4)	TARGET TAHUNAN (2018) (5)
1	Terselenggaranya Kampanye Prilaku Hidup Sehat dan Bersih bagi pelajar	Terpenuhinya Kampanye Prilaku Hidup Sehat dan Bersih bagi pelajar	1 Laporan	1 Laporan

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Upaya Kesehatan Masyarakat	1.1. Kampanye Prilaku Hidup Sehat dan Bersih bagi Pelajar	858.760.000

Manokwari, 4 April 2018



FORMAT PERJANJIAN KINERJA (PK) UNIT KERJA ESELON IV



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PADA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jemime Jacadewa, SKM

Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Fenny Mayana Paisey, M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 4 April 2018

Pihak Kedua,

(dr. Fenny Mayana Paisey, M.Si.)

Pihak Pertama,

(Jemime Jacadewa, SKM)

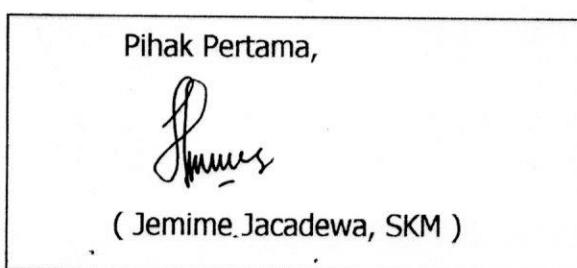
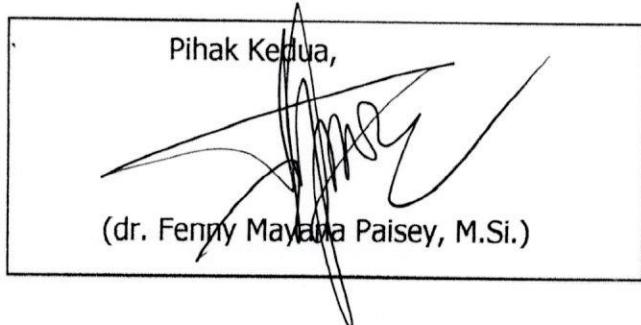
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
 UNIT KERJA : Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 TAHUN ANGGARAN : 2018

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	KINERJA (3)	SATUAN (4)	TARGET TAHUNAN (2018) (5)
1	Terselenggaranya Sosialisasi dan Advokasi PHBS	Terpenuhinya Sosialisasi dan Advokasi PHBS	Jumlah Peserta	59 orang
2	Terselenggaranya Kampanye Perilaku Hidup Sehat dan Bersih Bagi Pelajar	Terpenuhinya Kampanye Perilaku Hidup Sehat dan Bersih Bagi Pelajar	Jumlah Peserta	1 Laporan
3	Terselenggaranya Bimtek Pembinaan UKM Sekunder dan Primer	Terpenuhinya Bimtek Pembinaan UKM Sekunder dan Primer	Dokumen	13 Dokumen

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Upaya Kesehatan Masyarakat	1.1. Sosialisasi dan Advokasi PHBS	302.391.600
		1.2. Kampanye Perilaku Hidup Sehat dan Bersih Bagi Pelajar	858.760.000
		1.3. Bimtek Pembinaan UKM Sekunder dan Primer	1.037.150.000

Manokwari, 4 April 2018



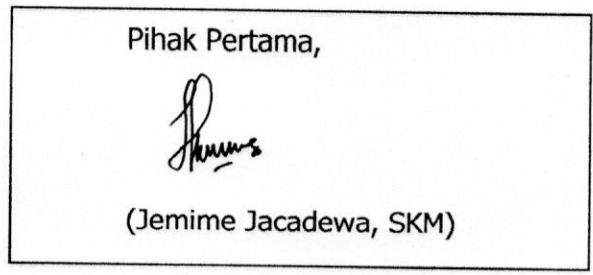
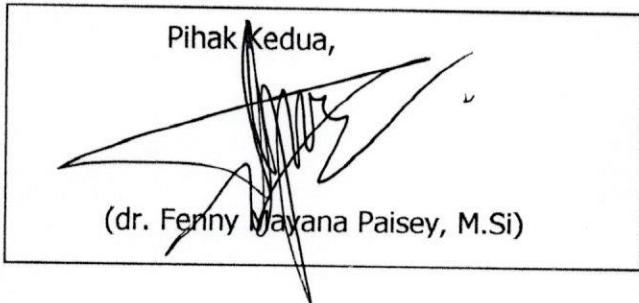
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
UNIT KERJA : Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
TAHUN ANGGARAN : 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terselenggaranya Penguatan Program PIS PK	Terpenuhinya Penguatan Program PIS PK	Dokumen	1 Dokumen

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Upaya Kesehatan Masyarakat	1.1. Penguatan Program PIS PK	195.151.400

Manokwari, 4 April 2018



FORMAT PERJANJIAN KINERJA (PK) UNIT KERJA ESELON IV



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PADA SEKSI KEFARMASIAN DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Bhaktiar, Apt.

Jabatan : Kepala Seksi Kefarmasian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Petrus Hosyo, S.Sos.

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 4 April 2018

Pihak Kedua,

(Petrus Hosyo, S.Sos.)

Pihak Pertama,

(Drs. Bhaktiar, Apt.)

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

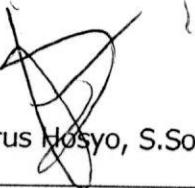
: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Seksi Kefarmasian
: 2018

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	SATUAN (4)	TARGET TAHUNAN (2018) (5)
1	Tersedianya buffer stok obat dan bahan habis pakai	Persentase kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	Persen	100 Persen (%)
2	Terdistribusinya Obat dan tiba di Kabupaten/Kota sebesar 100 %	Jumlah Kab/ kota yang terdistribusi	Kabupaten/ Kota	13 Kabupaten/ kota
3	Terlaksananya DAK Farmasi	Jumlah dokumen DAK Farmasi yang tersusun	Dokumen	1 Dokumen
4	Terlaksananya Pembangunan Taman Instalasi Farmasi	Jumlah Lahan	Lahan	1 Lahan

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.1. Pengadaan Buffer Stok Obat dan Bahan Habis Pakai	8.038.208.280
		1.2. Distribusi Obat dan Vaksin ke kabupaten/ kota	1.300.009.170,04
		1.3. DAK Farmasi	850.055.000
		1.4. Pembangunan/Penataan Halaman Instalasi Farmasi	1.910.000.000

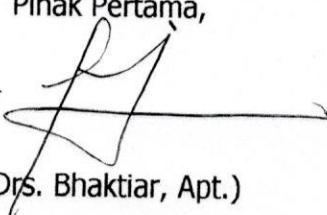
Manokwari, 4 April 2018

Pihak Kedua,



(Petrus Hosyo, S.Sos.)

Pihak Pertama,



(Drs. Bhaktiar, Apt.)

FORMAT PERJANJIAN KINERJA (PK) UNIT KERJA ESELON IV



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PADA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN **DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT**



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yonece Marieke Modouw, S.ST

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Viktor Eka Nugrahaputra, M.Kes.

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 4 April 2018

Pihak Kedua,

(dr. Viktor Eka Nugrahaputra, M.Kes.)

Pihak Pertama,

(Yonece Marieke Modouw, S.ST)

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

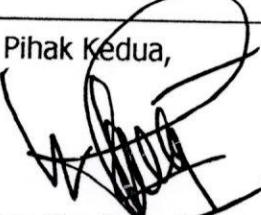
SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
: 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah orang Papua yang menerima rujukan Kesehatan	Jumlah rujukan kesehatan bagi orang Papua yang dilayani	Jumlah orang	30 Orang
2	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Rujukan Kesehatan bagi orang Papua tingkat Provinsi	Jumlah laporan sosialisasi rujukan kesehatan bagi orang Papua	Jumlah Laporan	1 Laporan

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Rujukan Kesehatan bagi orang Papua	1.1. Rujukan kesehatan bagi orang Papua	2.000.000.000
		1.2. Sosialisasi Rujukan Kesehatan bagi orang Papua tingkat Provinsi	50.463.100

Manokwari, 4 April 2018

Pihak Kedua,	
(dr. Viktor Eka Nugrahaputra, M.Kes.)	

Pihak Pertama,	
(Yonece Marieke Modouw, S.ST)	